

SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN APBDES
PEMERINTAH DESA KADINGEH KABUPATEN ENREKANG
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**ALFINA
NIM: 18.2800.057**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN APBDES
PEMERINTAH DESA KADINGEH KABUPATEN ENREKANG
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**ALFINA
NIM: 18.2800.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes
Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang
(Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Alfina

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.057

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1576/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.
NIP : 196502202000031002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 197209292008011012

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 197301292005011004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes
Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang
(Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Alfina

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.057

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1576/In.39.8/PP.00.9/5/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Firman, M.Pd.

(Ketua)

Abdul Hamid, S.E., M.M

(Sekretaris)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

(Anggota)

Dr. Arqam, M.Pd.

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 197301292005011004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah robbil'alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hajrah dan Ayahanda tercinta Alo yang senantiasa member semangat, nasihat dan doanya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku pembimbing utama dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag.,M,A, sebagai Wakil Dekan FEBI.
3. Bapak Abdul Hamid, S.E.,M.M. sebagai penanggung jawab program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu.
8. Bapak Umar S.Pd.I selaku Kepala Desa Kadingeh yang telah memberikan Izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sekaligus banyak membantu dalam proses penelitian.
9. Kepada Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.

10. Kepada Adik-adik saya, Nurlaila, Abdul Syam, Muhammad Aldi, serta seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
11. Semua teman-teman dari Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, teman seperjuangan KPM dan PPL, serta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 29 Januari 2022 Masehi
27 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis



ALFINA
NIM.18.2800.057

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alfina
NIM : 18.2800.057
Tempat/Tanggal Lahir : Tiktok, 31 Agustus 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes
Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang
(Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Januari 2022

Penyusun,



Alfina

Nim. 18.2800.057

ABSTRAK

Alfina. *Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh Firman dan Abdul Hamid)

Pengelolaan APBDes memerlukan media dalam pengelolaannya agar tata kelolanya lebih optimal dan efisien. Salah satu media dalam tata usaha pengelolaan anggaran dan keuangan yaitu sistem informasi akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan Apbdes oleh pemerintah Desa Kadingeh mencakup penerapannya, Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dengan prinsip akuntansi syariah, yaitu: pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) fenomologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Desa Kadingeh dalam pengelolaan keuangannya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini memberi kemudahan bagi pemerintah Desa Kadingeh dalam penatausahaan dan pengelolaan penganggaran APBDes. (2) Sistem Informasi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Kadingeh dalam kegiatannya selalu berupaya melibatkan masyarakat untuk ikut serta bermusyawarah dan memberikan usulan terkait perencanaan dan pengelolaan APBDes agar dapat tersampaikan bentuk transparansi pengelolaan APBDes kepada masyarakat.

Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, APBDes, transparansi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
	C. Fokus Penelitian.....	34
	D. Jenis dan Sumber Data	35
	E. Teknik Pengumpulan Data	36
	F. Teknik Pengolahan Data	38
	G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang	42
	B. Analisis Akuntansi Syariah Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	66
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		V
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pengelola APBDes	45
4.2	Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa) Kadingeh	46



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Fikir	32
2.2	Menu Data Rencana Kegiatan Desa Pada Aplikasi Siskeudes	49
2.3	Menu Perencanaan RPJM Desa Pada Aplikasi Siskeudes	51
2.4	<i>Flowchart</i> Tahap Penyusunan APBDes	52
2.5	Menu Perencanaan dan Penganggaran APBDes Pada Aplikasi Siskeudes	56
2.6	Menu Penatausahaan Keuangan Desa Pada Aplikasi Siskeudes	57

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Pengantar dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Berita Acara Revisi Judul Skripsi
6	Profil Desa Kadingeh
7	Struktur Organisasi Desa Kadingeh
8	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kadingeh Tahun Anggaran 2020
9	Dokumentasi
10	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), dan ditetapkan oleh DPRD. Peraturan desa. Desa merupakan daerah otonom terendah dan secara otomatis akan menjadi subyek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan peraturan desa yang memuat tentang sumber-sumber distribusi pendapatan dan belanja desa dalam satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disingkat APBDes sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan suatu desa. Pembangunan desa merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, pembangunan ini dapat berupa penanggulangan kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar (kebutuhan primer). Perencanaan perbaikan desa harus terdiri dari pemikiran untuk menggali kemampuan dan peningkatan desa dimana jaringan berpartisipasi dalam proses pembangunan yang tipikal samoaiselesai.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, peneliti melihat bahwa bencana longsor yang terjadi di Desa Kadingeh pada tahun 2019 lalu, mengakibatkan banyak kerusakan seperti, kerusakan rumah penduduk, lahan pertanian penduduk longsor,

serta jalan poros yang menjadi sarana penghubung masyarakat dengan pasar dan juga merupakan jalan poros ikut ambruk, hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih memaksimalkan pembangunan ulang (Rekontruksi) dan pemindahan lokasi rumah penduduk (Relokasi).

Setiap tempat ingin mendapatkan fasilitas, perlindungan sosial, dan rasa aman yang utuh, terutama bagi masyarakat yang berisiko terkena bencana dan terkena dampak gangguan yang merupakan dampak dari bencana yang terjadi, salah satunya adalah masyarakat di Desa Kadingeh ini.. Walaupun bencana longsor yang terjadi pada tahun 2019 di Desa Kadingeh telah berlalu namun masyarakat tetap merasa cemas karena sebagian rumah masyarakat masih berada di lokasi yang diklaim rawan longsor, sehingga diharapkan agar pelaksanaan relokasi dan rekontruksi cepat diselesaikan oleh pemerintah desa melalui realisasi anggaran APBDes. Dalam pengelolaan APBDes tersebut tentunya pemerintah memerlukan adanya media yang dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa dan alokasi sumber daya yang ada untuk penanggulangan dan pengalokasian dana untuk pembangunan, rekontruksi dan relokasi desa tersebut.

Salah satu alat yang dapat digunakan sebagai arsip adalah laporan keuangan desa, dalam pencatatan, pelaporan dan penanganan anggaran tersebut sangatlah penting untuk memiliki metode dan proses pencatatan dan pelaporan pencatatan dan pencatatan yang berkaitan dengan situasi keuangan desa, yang disebut dengan fsistem informasi akuntansi. Sistem Informasi akuntansi adalah perangkat yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi moneter menjadi catatan yang dapat digunakan oleh orang yang menginginkannya.

Sistem informasi akuntansi mencakup banyak faktor yang saling terkait yang bersatu untuk mendapatkan impian atau tujuan sistem, dalam sistem informasi akuntansi informasi diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga dihasilkan keluaran (output) yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sistem informasi akuntansi ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah desa dalam penyajian dan pengelolaan informasi dalam hal ini untuk tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam pembangunan, rekontruksi dan relokasi Desa Kadingeh. Selain memudahkan bagi pemakainya dalam mengolah informasi mencatat dan membukukan transaksi keuangan juga merupakan anjuran Allah swt sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Albaqarah ayat 282. Dalam segala kegiatan ekonomi termasuk dalam pencatatan keuangan harus benar-benar didasarkan pada prinsip syariah terutama mengutamakan Maslahah dan falah agar masyarakat dapat menjadi makmur serta sejahtera dalam prosesnya laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban selain itu dalam pencatatannya harus berdasarkan sifat tauladan nabi yaitu *Siddiq* (jujur), *Fathanah* (cerdas), *Amanah* (terpercaya), dan *Tabliq* (transparan).

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tentunya tidak terlepas dari beberapa kendala dalam prosesnya baik itu kendala sistem *hardware*, *software* maupun kendala dari sumber daya manusia atau pemakainya *Brainware*. Dalam penerapannya banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBDes dimana pengelola harus transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan.

Penelitian terkait sistem informasi akuntansi pengelolaan apbdes pemerintah desa ini dilakukan di Desa Kadingeh yang terletak di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang. Penulis ingin mengkaji tentang sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan APBdes terkhusus di Desa Kadingeh. Sehubungan dengan latar yang diuraikan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah)**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai judul dan latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas maka penulis perlu membentuk rumusan masalah yang dianggap penting serta jawabannya akan dicari pada penelitian ini.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Penganggaran APBDes yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Analisis Akuntansi Syariah terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar bisa meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca serta menganalisis terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Kadingeh, penulis berharap penelitian dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah) ini dapat dijadikan sebagai acuan dan dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan APBDes. Mengacu pada rumusan

masalah penelitian adapun tujuan penelitian ini secara rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis Sistem Informasi Akuntansi penganggaran APBDes Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Desa Kadingeh
2. Menganalisis Bagaimana Analisis Akuntansi Syariah terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

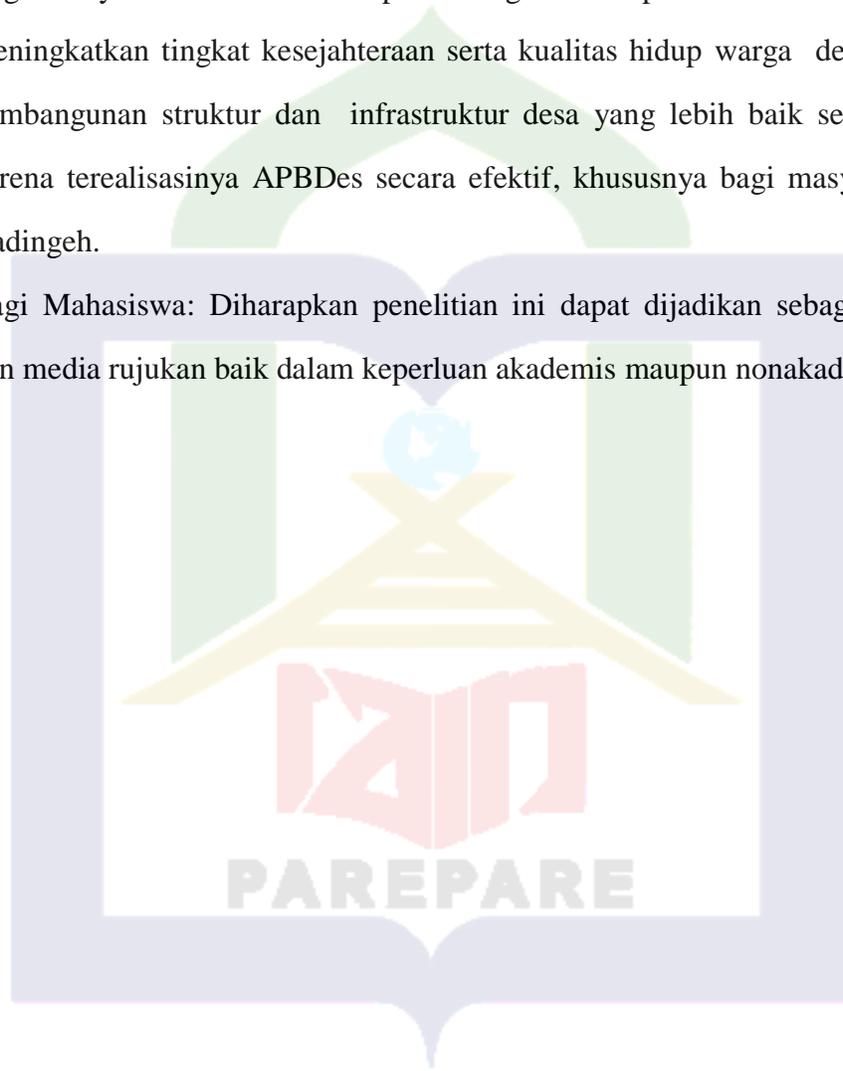
Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, serta agar menambah wawasan pembaca terkait Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh berdasarkan analisis akuntansi syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.Tr.Ak pada program studi akuntansi lembaga keuangan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam. Disamping itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait Sistem informasi akuntansi pengelolaan Apbdes pemerintah Desa Kadingeh. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem informasi akuntansi yang baik sehingga bisa dijadikan oleh penulis sebagai pelajaran dan sebagai referensi dikemudian hari.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Penulis Berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Desa

Kadingeh sebagai media informasi dan sebagai alat pengambilan keputusan, agar dalam menjalankan tugasnya pihak pemerintah desa lebih terarah kerana memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya.

- c. Bagi Masyarakat Desa: Diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan serta kualitas hidup warga dengan adanya pembangunan struktur dan infrastruktur desa yang lebih baik serta memadai karena terealisasinya APBDes secara efektif, khususnya bagi masyarakat Desa Kadingeh.
- d. Bagi Mahasiswa: Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan baik dalam keperluan akademis maupun nonakademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan (mirip) dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Penelitian tersebut ialah Jenis penelitian kualitatif menggunakan memakai pendekatan deskriptif. konklusi asal penelitian Chandra Kusuma Putra dkk ini yaitu sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk porto operasional pemerintah desa sehingga penggunaan ADD diklaim tidak sesuai dengan tujuan awalnya.¹ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu masing-masing menelaah terkait Alokasi dana Desa dan Pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan masing-masing adalah penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian tadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Lokasi penelitian serta penekanan penelitian, penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi

¹ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo. “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Tahun 2013, h 1211.

Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) tersebut lebih berfokus pada pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Eka Putra Mardiana, Ni Kadek Sinarwati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja. Tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (sia) pada lembaga perkreditan desa (lpd) di kecamatan susut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Purposive Sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kesimpulan penelitian ini yaitu Secara parsial kinerja LPD khususnya kesenangan pengguna SIA di Kecamatan menurun, variabel yang berpengaruh besar adalah unsur keterlibatan orang, bantuan atasan, sedangkan variabel potensi teknis swasta, panjang organisasi, formalisasi pengembangan mesin, pengguna pendidikan dan persekolahan, dan keberadaan dewan bimbingan tidak berpengaruh secara substansial signifikan². Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah masing-masing mengamati sistem pencatatan akuntansi di desa dan juga kedua penelitian ini masing-masing merupakan penelitian lapangan (field research). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lokasi obyek penelitian dan juga fokus penelitian, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada sistem informasi akuntansi pengelolaan APBDes. Sedangkan penelitian ini

² Gede Eka Putra Mardiana, Ni Kadek Sinarwati, dan Ananta wikrama Tungga Atmadja. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Susut". e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1. Volume: 2 No. 1. Tahun 2014, h 10.

objek penelitiannya lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada lembaga perkreditan desa. Perbedaan lainnya yaitu penelitian Gede Eka Putra Mardiana, Ni Kadek Sinarwati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja Gede Eka Putra Mardiana, dkk ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif sehingga teknik pengolahan data dan teknik analisis data dari kedua penelitian ini juga pasti berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Khozin Arief tentang model sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi desa Alasan penelitian ini adalah untuk memberikan versi sistem dan taktik pengelolaan akuntansi desa yang akan dilakukan di desa sesuai dengan pedoman hukum dan peraturan pemerintah. Temuan dari penelitian ini adalah pegawai pengelola akuntansi desa harus melihat pedoman hukum dan aturan pemerintah dalam menyelenggarakan akuntansi desa. Dengan terbatasnya kompetensi mereka di bidang akuntansi dan administrasi, kepentingan administratif ini sangat sulit bagi mereka.³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu masing-masing mengkaji terkait model sistem informasi akuntansi desa serta teknik pengumpulan data masing-masing dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan lainnya yaitu kedua penelitian ini mengaitkan pada penatausahaan akuntansi desa. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah lokasi yang menjadi obyek penelitian, dan juga penelitian ini dilakukan dengan perspektif umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan analisis akuntansi syariah dan fokus penelitian ini lebih condong pada model, prosedur dan

³ Khozin Arief, “*Model Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa*”. Sigma-Mu. Vol.10 No.1, Maret 2018, h. 38.

sistem akuntansi desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih keanalisis sistem akuntansi pengelolaan APBDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo tentang sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh desa terkait pengelolaan dana desa dan menawarkan arahan dalam pengendalian dana desa. Dugaan penelitian ini adalah aparat desa belum memiliki kesiapan untuk memberlakukan Perda 6/2014. Mereka tidak lagi secara mutlak mengakui pengelolaan anggaran desa terutama berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini diperparah dengan rendahnya kepuasan sumber daya manusia, hilangnya sosialisasi dan bimbingan. Padahal, aparat desa memiliki semangat untuk terus menyukseskan program dana desa dari otoritas vital, terutama dengan bantuan paket-paket tambahan untuk menyerap kisaran harga desa. Utilitas program sistem akuntansi pengendalian dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sistem yang terkomputerisasi ini akan memudahkan aparat desa mulai dari perencanaan, statistik akuntansi hingga pembuatan laporan keuangan tengah tahunan dan tengah tahunan.⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah masing-masing meneliti terkait sistem akuntansi dan pengelolaan dana desa serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan kedua penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi tempat penelitian serta fokus penelitian, penelitian ini lebih fokus meneliti bagaimana

⁴ Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, "*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 19 No. 2, Agustus 2016, h. 323.

pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus tentang sistem informasi akuntansi pengelolaan APBDes.

B. Tinjauan Teori

1. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Wilkison Sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berfungsi secara individual untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Serta menurut Mulyadi Sistem merupakan suatu kesatuan jaringan yang dibuat menurut suatu pola yang terpadu untuk menjalankan manajemen atau aktivitas perusahaan.⁶

Data adalah fakta yang belum diolah mengenai suatu objek misalnya orang, tempat, fenomena, dan hal-hal penting dalam organisasi. Informasi artinya data yang sudah diolah dan diorganisir membentuk menjadi sesuatu yang berarti,⁷ Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi merupakan pengaturan sumber daya manusia, data, proses, dan teknologi informasi yang saling berkaitan dengan tujuan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, serta menyediakannya menjadi output informasi yang dibutuhkan untuk mendukung suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.⁸

Setiap sistem informasi terdiri berasal beberapa blok-blok yang menghasilkan sistem tersebut, bagunan sistem informasi terdiri dari enam blok

⁵ J.W.Wilkinson dkk, *Accounting Information System:Essential Concepts and Applications* , (Australia: John Wiley & Sons, Inc., 2000), h. 6.

⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 6.

⁷ Jeffery, Lonnie dan Kevin. *Metode Desain dan Analisis Sistem*, edisi 6. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004)

⁸ Jeffery, Lonnie dan Kevin. *Metode Desain dan Analisis Sistem*, edisi 6. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004)

komponen yang biasa disebut *information system building blok*. Blok-blok yang dimaksud diantaranya adalah:

a. Blok Masukan (*Input Block*)

Masukan merupakan data dimasukkan ke dalam gadget sistem informasi dengan teknik dan media untuk memotret dan memasukkan catatan ke dalam gadget sistem informasi. blok input meliputi transaksi, pertanyaan, perintah dan pesanan.

b. Blok Model (*Model Block*)

Blok model terdiri dari *logico mathematical models* yang melakukan olah data yang diinput dan data yang tersimpan dengan menggunakan berbagai cara dan proses sehingga menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan. Blok model ini dapat menggabungkan beberapa unsur dan meringkasnya sehingga menjadi laporan yang dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan.

c. Blok Keluaran (*Output Block*)

Keluaran/Hasil (*output*) yaitu produk dari sistem informasi berupa informasi serta dokumen yang dianggap memiliki guna bagi manajemen dan pihak-pihak yang memerlukan informasi, baik pihak internal maupun pihak eksternal dari luar jaringan organisasi. Alat yang menyajikan hasil output sistem informasi dapat berupa layar, monitor, mesin cetak, serta audio dan film.

d. Blok Teknologi (*Technology Block*)

Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi memproses data mulai dari menangkap masukan, menjalankan model, mengakses data, serta mengendalikan seluruh sistem sampai menghasilkan keluaran yang diinginkan.

e. Blok Basis Data (*Data Base Block*)

Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengabungkan data dalam bentuk fisik agar data dapat diproses dengan relevan, tepat dan teliti sehingga memudahkan pengambilan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. Basis data secara fisik dapat berupa buku besar, pita magnetik, disk, kaset, *chip*, dan *microfilm*.

f. Blok Pengendalian (*Control Block*)

Sistem informasi membutuhkan pengendalian (*controlling*) agar sistem informasi dapat terlindungi dari kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan serta ketidakefisienan. Manajemen perlu untuk membuat prosedur pengamanan dan pengendalian yang sesuai dengan sistem informasi.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan gabungan dari tiga kata yaitu, Sistem, Informasi dan Akuntansi. Sistem dapat didefinisikan sebagai rangkaian beberapa komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai beberapa tujuan.⁹

Informasi merupakan data yang sudah diolah dan diproses sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Akuntansi adalah proses pencatatan transaksi yang pembuktiannya dilihat dari faktur yang ada, kemudian dibuatkan jurnal berdasarkan data dari transaksi yang terjadi, selanjutnya mengacu pada data tersebut dibuatlah buku besar, neraca lajur, kemudian akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh beberapa pihak yang membutuhkannya untuk digunakan sebagaimana mestinya.¹¹ Selanjutnya, Menurut Sumarsan Akuntansi adalah suatu karya seni untuk memperoleh,

⁹ Krismanji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 1.

¹⁰ TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h.4.

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 3.

menemukan, mengklasifikasikan, melaporkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keuangan agar dihasilkan catatan-catatan ekonomi yang merupakan arsip ekonomi yang dapat digunakan oleh peristiwa-peristiwa akuntansi. berkaitan dengan keuangan agar dihasilkan catatan keuangan yang berupa dokumen moneter yang dapat digunakan oleh pihak berkepentingan.¹²

Sistem Informasi Akuntansi adalah sekelompok asset sumber daya (*resources*), yang mencakup orang dan peralatan yang dirancang untuk mengembangkan data keuangan dan data yang diperlukan lainnya agar dapat menjadi sebuah informasi. informasi ini kemudian didiskusikan kepada para pengambil keputusan dengan cara yang sangat beragam.¹³ Sebelumnya sistem informasi akuntansi ini disebut dengan sistem akuntansi karena saat itu sistem akuntansi yang digunakan masih serba manual. Adapun yang dimaksud sistem akuntansi desa atau dapat berupa Alat pembukuan administrasi desa yaitu pencatatan atas proses transaksi yang terjadi di desa yang dibuktikan melalui catatan-catatan kemudian dapat dilakukan pencatatan dan pelaporan ekonomi sehingga dapat dihasilkan catatan informasi dalam bentuk laporan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan desa, khususnya masyarakat desa, aparat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah yang berada pusat.¹⁴

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pihak terkait untuk tujuan pengambilan keputusan. SIA dapat berupa mesin

¹² T. Sumarsan, *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*, (Jakarta: PT Indeks, 2017), h. 1.

¹³ Cenik Ardana dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h 45.

¹⁴ Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) h. 17.

pemandu atau perangkat komputerisasi yang menggunakan teknologi statistik modern. Pendekatan sesuatu yang digunakan, caranya tetap sama karena masing-masing manual dan teknologi arsip adalah peralatan terbaik yang digunakan untuk menghasilkan arsip yang dapat digunakan sebagai media informasi.¹⁵

a. Unsur Sistem Informasi Akuntansi

1) Formulir

Formulir atau biasa pula dianggap dokumen merupakan suatu alat yang dipergunakan menjadi media buat merekam (mendokumentasikan) suatu transaksi yang terjadi. Model formulir antara lain artinya faktur penjualan, bukti kas keluar, cek dan lainnya. Pada sistem akuntansi secara manual (manual system) media yang digunakan buat mencatat transaksi adalah formulir yang terbuat dari kertas (paper form), pada sistem akuntansi memakai komputer (computerized system) terdapat aneka macam media yang bisa digunakan buat merekam transaksi diantaranya papan ketik (*keyboard*), *optical and magnetic characters and code*, *mice*, *voice*, *touch sensor*, and *cats*.

2) Jurnal

Jurnal artinya catatan akuntansi yang paling awal didesain guna buat mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan serta data lainnya. sumber data yang dicatat dalam jurnal ialah formulir. Dalam jurnal data digolongkan sinkron menggunakan info yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Contoh jurnal yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum.

3) Buku Besar

¹⁵ TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi*,(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h.6

Buku besar (*general ledger*) terdiri berasal akun-akun yang sudah diringkas dan dicatat sebelumnya pada jurnal. Akun-akun pada buku besar ini akan dicatat sesuai dengan unsur-unsur isu yang akan disajikan, akun buku besar ini ialah wadah buat menggolongkan data keuangan serta merupakan asal informasi keuangan buat penyajian laporan keuangan.

4) Buku Pembantu

Buku pembantu adalah rincian berasal akun-akun pembantu berisi data keuangan berasal buku besar yang memerlukan perician. Buku besar serta buku pembantu ialah catatan akuntansi akhir (*books of final entry*) sebab selesainya data keuangan sudah dicatat dalam buku-buku tersebut langkah selanjutnya ialah penyajian laporan keuangan.

5) Laporan

Hasil akhir proses akhir proses akuntansi ialah laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan ialah info atau keluaran (hasil) dari data keuangan yang sudah diolah sebelumnya, laporan bisa berbentuk hasil cetak komputer atau semacamnya.

b. Manfaat dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat beberapa manfaat sistem informasi akuntansi sistem isu akuntansi yang dibuat serta diolah dengan baik, yaitu bisa menambah nilai untuk organisasi menggunakan beberapa pengembangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan mengurangi biaya anggaran

- 2) Meningkatkan efisiensi aktivitas organisasi
- 3) Menambah berbagai pengetahuan
- 4) Meningkatkan efisiensi dan afektivitas rantai pasokan organisasi
- 5) Meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan.¹⁶

Tiga fungsi sistem informasi akuntansi adalah:

- 1) Pengumpulan dan pemrosesan data yang efektif dan efisien yang berkaitan dengan operasi organisasi isnis.
 - 2) Menghasilkan informasi untuk tujuan pengamilan keputusan.
 - 3) Melaksanakan pemantauan ketat untuk memastikan ahwa data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses dengan enar dan sesuai dengan data.¹⁷
- c. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto, sistem informasi akuntansi dibuat dengan tujuan utama mentransformasikan data akuntansi dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Menurut Wilkinson, sistem informasi memiliki tiga tujuan utama berdasarkan informasi yang dihasilkannya, tujuan tersebut adalah:

- 1) Untuk mendukung operasi atau operasi sehari-hari.
- 2) Mendukung pengambilan keputusan manajemen tautan.
- 3) Memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas, misalnya informasi laporan keuangan, laporan operasi, dll.¹⁸

Berdasarkan sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan

¹⁶ Marshl B. Romney, Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems*, Terj. Kikin Sakinah Nur Safira, Novita Puspitasari (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h 11.

¹⁷ Krismanji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: UPM STIM YKPN,2016), h. 23

¹⁸ .W.Wilkinson dkk, *Accounting Information System:Essential Concepts and Applications* , (Australia: John Wiley & Sons, Inc., 2000), h. 229.

keuangan desa, kepala desa menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa akan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, mengurus, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan anggaran desa.¹⁹

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan jumlah dana desa melalui laporan pembukuan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat bendahara desa adalah; buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank.²⁰

Sebelum ada sistem informasi akuntansi seperti sekarang ini, sistem informasi akuntansi disebut juga dengan sistem akuntansi, sistem akuntansi adalah suatu prosedur yang menyediakan informasi keuangan yang diperlukan bagi manajemen untuk memudahkan pengambilan keputusan, dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai manajemen adalah pemerintah Desa Kadingeh.

2. Desa

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas tanah, atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.²¹

¹⁹ Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 59.

²⁰ Khozin Arief, "Model Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa". *Sigma-Mu*. Vol.10 No.1, Maret 2018, h. 36.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa* Pasal 1 Ayat 1

Desa dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut jenisnya, yaitu:

- a. Desa tertinggal atau sangat tertinggal, yang memperhatikan faktor infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemampuan aksesibilitas masyarakat desa.
- b. Pembangunan desa, dengan memperhatikan unsur-unsur infrastruktur dasar pelayanan publik, sosial dan pendidikan serta kesehatan dasar dan pelayanan sosial infrastruktur epidemi.
- c. Desa maju atau mandiri, dengan memperhatikan faktor infrastruktur yang mempengaruhi ekonomi desa dan investasi, inisiatif desa untuk menciptakan lapangan kerja, integrasi teknologi tepat guna dan investasi melalui BUMDes.²²

Sesuai Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa atas dasar prakarsa desa berbasis masyarakat, hak atas asal dan adat desa. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan penasehat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan mandarin di desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis. BPD adalah organisasi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa atas dasar keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.²³

- a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang biasa disebut yang dibantu oleh perangkat desa yang disebut dengan nama lain.²⁴ Pemerintah desa dipimpin oleh

²² David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h.1.

²³ David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 2.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, h. 15.

kepala desa dan dibantu dengan aparat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan, pelaksana urusan, kepala dusun, dan sebagainya.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan, dijelaskan pula dalam Q.S An-Nisa/4: 59 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam islam kita harus menaati Ulil Amri dalam hal ini pemerintah, jika pemerintah membuat peraturan kita harus mengikuti dan menaatinya selama perintah itu tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits serta perintah itu sejalan dengan Ketentuan Allah dan RasulNya.

Menurut Kansil pemerintahan adalah strategi atau cara memerintah yang dilakukan pemerintah suatu daerah demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

b. Keuangan Desa

²⁵ PP No.43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pasal 1 Ayat 2.

²⁶ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), An-Nisa: 59.

²⁷ Cst Kansil dan Christine St Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 21.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.²⁸

Pendapatan asli desa adalah pendapatan dari pemerintah desa di tingkat desa setempat. Pendapatan desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara berarti anggaran desa ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota, yang digunakan untuk pengelolaan keuangan, pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat.²⁹

Dana desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa dengan maksud peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana desa, yang penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dipertanggung jawabkan oleh Kepala desa.

Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat nasional dalam APBN tahunan harus dikelola secara tertib, sesuai dengan undang-undang, efisien, hemat, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, proses, sadar. Pemerataan dan kepatuhan, dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal.³⁰

c. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah arah dan kegiatan bisnis yang tidak pernah berhenti. Proses pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan sosial dan budaya. Perkembangan menjadi proses maju sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya apa yang dirancang sebagai upaya pemerintah.

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 71 Ayat 1.

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 71 Ayat 1. Huruf (a dan b)

³⁰ PP Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Pasal 2.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian proses operasional yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan (pendapatan per kapita) dalam jangka panjang. Kesejahteraan itu sendiri ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita (pendapatan domestik bruto atau GDP) dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar.³¹ Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa rencana pembangunan desa disusun oleh Pemerintah Desa secara partisipatif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya serta menurut ayat (3) bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan desa diperlukan peran serta lembaga masyarakat desa.³²

Dalam arti luas, Pembangunan pedesaan mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.³³ Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam hal peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan

³¹ Subandi. *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 9.

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 *Tentang Desa* Pasal 63.

³³ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), h. 392.

dan tempat tinggal.

Pembangunan desa memiliki dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, Pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:³⁴

- 1) Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini disebut juga dengan pembangunan desa.
- 2) Pembangunan dalam rangka pemberdayaan manusia, khususnya pembangunan yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai warga negara, pembangunan dalam aspek ini seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan ekonomi, kesehatan, spiritual, dan lain-lain. Pembangunan dalam pengertian pemberdayaan manusia disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah desa. Rancangan Anggaran tersebut dibahas dalam kegiatan musyawarah yang terkait dengan pembangunan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bentuk tanggung jawab perangkat desa sebagai pengelola untuk memberikan informasi terkait kegiatan desa kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan dana dan pelaksanaan program yang

³⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 17.

dibiayai oleh dana desa.³⁵

Hakikat penyusunan APBDes yaitu untuk memenuhi pembiayaan terkait pembangunan desa dengan menganalisis sumber-sumber dana serta pengeluaran untuk keperluan pembangunan desa. Dengan adanya APBDes maka skala prioritas dan operasional kegiatan pembangunan dapat ditentukan secara tepat sehingga dapat terlaksana kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.³⁶

APBDes memiliki 6 fungsi utama yaitu:

- a. Sebagai Alat Perencanaan, anggaran adalah alat kontrol bagi sistem pengelolaan desa untuk mencapai tujuannya. Dengan anggaran desa yang telah ditentukan akan diperoleh rencana dan rician biaya yang dibutuhkan sehingga dapat merumuskan kebijakan agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai Alat Pengendalian, anggaran memuat rencana rinci mengenai keuangan, pendapatan, dan pengeluaran dana desa, sehingga dengan adanya anggaran manajemen akan lebih dapat mengendalikan pengeluaran dan penggunaan dana desa.
- c. Sebagai Alat kebijakan Fiskal, dengan adanya Anggaran maka estimasi keperluan ekonomi sehingga anggaran dapat digunakan untuk mendorong peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
- d. Alat Koordinasi dan Komunikasi, penyusunan anggaran memerlukan partisipasi

³⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 33.

³⁶Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*, (Banda Aceh: Read, 2011), h. 211.

berbagai pihak sehingga kegiatan penganggaran dapat menjadi ajang sinergi antar manajemen untuk meningkatkan konsistensi hasil kinerja yang positif.

- e. Alat evaluasi kinerja, aparatur pelaksana atau perangkat desa dapat dilihat dan dievaluasi dari pencapaian target anggaran yang telah disusun.
- f. Alat Motivasi, Anggaran dapat menjadi motivasi bagi perangkat desa agar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menyusun anggaran yang tepat dan sesuai agar perangkat desa bisa mendapatkan penilaian kinerja yang baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Pendapatan desa, yaitu jumlah yang diterima melalui rekening desa, merupakan hak desa selama satu tahun dan tidak perlu diganti oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis anggaran.
2. Belanja Desa, khususnya anggaran yang berkaitan dengan pengeluaran rekening desa, kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan disusun berdasarkan kelompok, kegiatan, dan kategori jenisnya.
3. Pembiayaan Desa yaitu semua penerimaan pendapatan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran desa, pada tahun anggaran atau tahun-tahun berikutnya.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Dalam negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 2 dijelaskan bahwa keuangan desa dikeloladengan dasar asas transparan, akuntabel, parsitipatif, tertib

³⁷ V. Devina Setyawati, Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019), h.51.

serta disiplin anggaran.³⁸ Kemudian, dalam pasal 29 dijelaskan bahwa Pengelolaan keuangan Desa meliputi beberapa tahap yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.³⁹

4. Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa arab disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasaba, atau wazan atau dari kata hasab, hasban, hisabah, artinya menimbang, menghitung, mendata, atau menghisab, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata *Hisab* banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan makna jumlah atau angka, kata hisab tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, dan akurat. Dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang telah dilakukan, perintah ini tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلْتُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

³⁸ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2. Ayat 1

³⁹ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 29.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (bermuamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁰

Jadi akuntansi syariah dapat dipahami sebagai proses akuntansi untuk transaksi menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disediakan oleh Syariah kepada pengguna pelaporan yang lebih luas tidak hanya data keuangan, tetapi juga mencakup kegiatan organisasi atau perusahaan yang beroperasi sesuai dengan Syariah dan memiliki tujuan sosial yang tidak dapat dihindari dalam Islam, seperti transaksi pembayaran zakat.⁴¹

a. Tujuan Akuntansi Syariah

Sistem Islam selalu bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran. Jadilah berbudi luhur dan singkirkan kejahatan, kesengsaraan, dan bahaya bagi semua makhluk. Di bidang ekonomi, sistem Islam mengarah pada terwujudnya keamanan

³³Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Baqarah: 282.

⁴¹ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 14.

dunia dan sekitarnya.

Tujuan akuntansi syariah adalah untuk melatih kecintaan kepada Allah swt, untuk melatih tanggung jawab, ketundukan dan kreativitas untuk transaksi, peristiwa ekonomi dan kegiatan organisasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Tujuan akuntansi syariah adalah: untuk mencapai keadilan sosial ekonomi (Al falah) dan sepenuhnya mewujudkan kewajiban terhadap Tuhan, masyarakat, dan individu dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam akuntansi Kegiatan ekonomi, yaitu akuntansi, audit, manajemen dan lain-lain sebagai salah satu bentuk ibadah.⁴²

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Ada beberapa prinsip akuntansi syariah diantaranya adalah:

1) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas selalu dikaitkan dengan konsep kepercayaan. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban dalam rangka menjalankan fungsi sebagai manusia yaitu khalifah dimuka bumi dengan senantiasa menjalankan dan menunaikan amanah. Implikasinya dalam akuntansi dan bisnis adalah bahwa mereka yang terlibat dalam bisnis harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan dan dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat.

2) Prinsip Kebenaran

Prinsip atau asas ini sangat berkaitan dengan prinsip keadilan, kegiatan akuntansi akan dilaksanakan dengan benar apabila dilandasi oleh nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan nilai wajar dalam pelaporan dan pelaksanaan

⁴² Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 16.

kegiatan akuntansi. Oleh karena itu, dalam perkembangan akuntansi syariah, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus selalu diwujudkan dalam praktik akuntansi.⁴³

3) Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 dijelaskan tentang prinsip keadilan nilai penting dalam etika baik di bidang sosial maupun komersial atau bisnis. Pada konteks akuntansi, ayat ini menegaskan bahwa dalam praktik akuntansi perusahaan, setiap transaksi harus dicatat dengan adil dan sebenar-benarnya.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (analisis akuntansi syariah). Agar mendapat gambaran yang lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang nama penelitian ini, sebaiknya penulis menjelaskan tujuan dari nama tersebut disebutkan dan menjelaskan keterbatasan dan konsep dasar judul penelitian ini sehingga dapat menjadi acuan pembaca dan penulis agar lebih memahami terkait poin-poin yang dijelaskan.

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menggabungkan kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari untuk mendukung fungsi operasional suatu organisasi manajemen dengan kegiatan strategis suatu organisasi untuk menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan yang dibutuhkan.

Suatu sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang dikenal sebagai building block yang terdiri dari beberapa blok yaitu, blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok database dan blok kontrol. Keenam blok ini saling

⁴³ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016)., h. 17.

berinteraksi dan bergantung satu sama lain sebagai suatu sistem sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Sistem Informasi Akuntansi adalah seperangkat sumber daya yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi, informasi yang dihasilkan dan dapat digunakan untuk sejumlah tujuan, termasuk pengambilan keputusan.⁴⁵

Sistem informasi akuntansi merupakan gabungan dari beberapa sumber daya yang telah diolah menjadi sebuah rancangan keuangan dan diorganisir menjadi sebuah informasi, sistem informasi ini dapat dilaksanakan secara manual maupun komputerisasi.

2. Desa

Desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari asosiasi ini adalah pola akibat interaksi faktor sosial, ekonomi, politik, budaya dan fisiologis dan hubungannya dengan daerah lain.⁴⁶

Desa dalam pengertian umum adalah pemukiman manusia yang terletak di luar kota, dimana penduduknya hidup dari bercocok tanam atau berladang.⁴⁷

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh para pihak oleh pemerintah desa dalam musyawarah dan ditetapkan dengan peraturan

⁴⁴ Tata Sutabri, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), h. 46-47.

⁴⁵ Bodnar, George and Hopwood, Wilham S, *Accounting Information System*, 9th Edition. (New Jersey: Prentice-HI. Inc, 1998), h. 1.

⁴⁶ R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 11.

⁴⁷ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 44.

perundang-undangan dari desa. Anggaran disiapkan minimal setahun sekali.⁴⁸

4. Akuntansi Syariah

Secara umum, konsep akuntansi syariah dapat dijelaskan dengan kata kuncinya, yaitu akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi-transaksi kemudian mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi-transaksi tersebut untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah dan diikuti oleh manusia ketika melakukan semua aktivitas hidup mereka di dunia.⁴⁹

Akuntansi Islam adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Akuntansi Islam tidak hanya alat untuk mengubah fenomena ekonomi tetapi juga metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi akan terjadi dalam masyarakat Muslim. Akuntansi syariah dianggap sebagai salah satu perhitungan atau perhitungan yang mengunggulkan yang baik dan mengharamkan yang buruk.⁵⁰

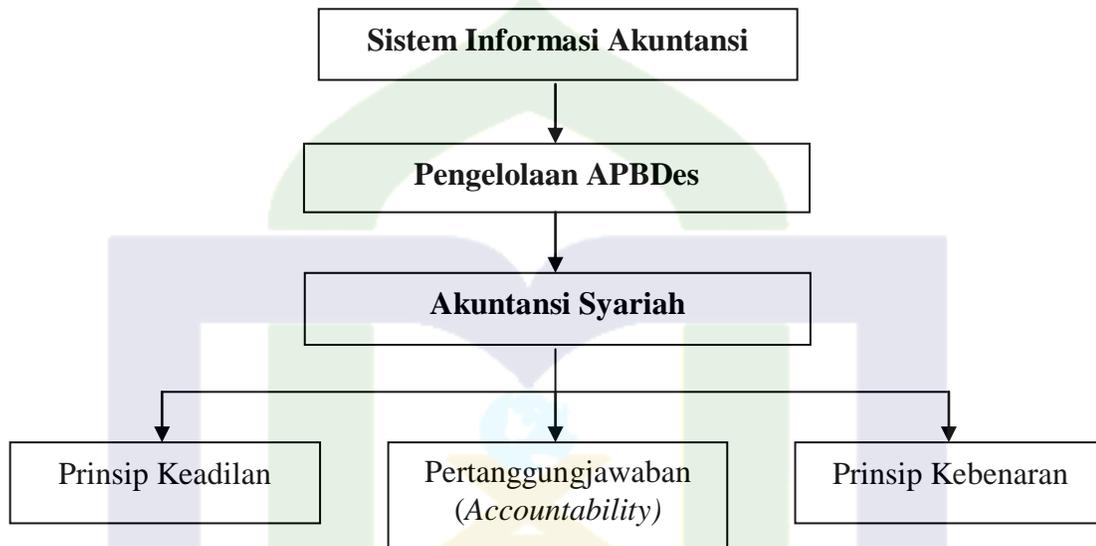
⁴⁸ V. Devina Setyawati, Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019), h.57.

⁴⁹ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 13.

⁵⁰ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016), h. 14.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Pada Kerangka pikir diatas sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah dimana Sistem informasi akuntansi pengelolaan APBDes merupakan objek utama yang akan diteliti bagaimana penerapannya oleh Desa Kadingeh dan bagaimana analisisnya berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini nantinya dilakukan dengan menyertakan analisis akuntansi syariah sebagai acuan, dimana akuntansi syariah memiliki tiga prinsip yaitu prinsip keadilan, pertanggungjawaban, dan prinsip kebenaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah masalah bagaimana seseorang mempersepsikan dan mendekati materi pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Fenomenologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam masalah-masalah sosial daripada menggambarkan bagian realitas yang dangkal.⁵² Serta menurut Denzim dan Lincion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan dasar ilmiah, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada.⁵³

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendaptkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 85.

⁵³ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24.

dilapangan.⁵⁴ Data-data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, data diangkat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan subjek yang diteliti yaitu bagaimana sistem informasi akuntansi pengelolaan APBDes yang diterapkan oleh pemerintah Desa Kadingeh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah adalah tempat digunakannya proses penelitian untuk memecahkan masalah dari penelitian yang sedang berlangsung.⁵⁵ Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Desa Kadingeh terbentuk pada tahun 2002 dan merupakan hasil dari pemekaran dari desa Banti pada saat itu Desa Kadingeh dipimpin oleh Tahir Silasa Ba yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Kecamatan Baraka . Desa Kadingeh terdiri dari empat dusun antara lain : Dusun Tiktok, Dusun Deakaju, Dusun Asaan, Dusun Lombon.

Geografis Desa Kadingeh terletak 100 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau 13 Km dari Ibukota Kecamatan Baraka dengan luas wilayah 1213 Ha, dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Janggurara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulu Kec Bungin, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ledan Kec Buntu Batu dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banti.

Keadaan iklim di Desa Kadingeh terdiri dari: Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d

⁵⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995) , h. 58.

⁵⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 53.

Juli, musim kemarau antara bulan September s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Juli s/d Agustus.

Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan, penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan penelitian kualitatif untuk memilih data mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan judul penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih data yang ada dilapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang didapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada sistem informasi akuntansi desa. Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.⁵⁶

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, demikian juga dengan jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan instrumen

⁵⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 124.

penelitian yang telah ditetapkan, data primer ini lebih akurat karena diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan subjek penelitian sehingga menjadikan data primer ini lebih terperinci. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumbernya yaitu pemerintah Desa Kadingeh yang menjadi penanggungjawab sistem akuntansi desa dan juga masyarakat Desa Kadingeh yang menjadi objek dari pembangunan Desa Kadingeh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain. Data sekunder ini biasanya berupa publikasi. Sumber data sekunder ini terutama adalah data statistik atau data yang telah diolah secara siap pakai. Data dalam bentuk statistik umumnya tersedia dari kantor pemerintah, kantor layanan data, perusahaan swasta atau pihak lain yang terlibat dalam penggunaan Data.⁵⁷ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga yang menjadi subjek penelitian seperti data yang ada di kantor Desa Kadingeh, dokumen, arsip, dan juga data dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat penting yang dapat mempengaruhi kualitas data penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, parameter, dan berbagai cara.⁵⁸ Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis yang berkaitan

⁵⁷ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137.

dengan hal yang sedang diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan observasi langsung.⁵⁹ Observasi merupakan salah satu teknik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknik lainnya. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses biologis dan psikologis yang berbeda. Teknik pengumpulan data observasional digunakan ketika penelitian berfokus pada perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan ketika objek pengamatan tidak terlalu besar.⁶⁰ Data yang di peroleh dari hasil observasi yaitu data terkait Pengelolaan dan realisasi APBDes Desa Kadingeh diantaranya peneliti memperoleh laporan realisasi anggaran, peraturan desa terkait APBDes beserta struktural tim penyusun APBDes dan dokumen penunjang lainnya.

2. Wawancara

Wawancara, adalah metode pengumpulan data percakapan untuk memperoleh informasi tertentu.. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pewawancara yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.⁶¹ Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif..⁶²

Wawancara digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti dan ketika peneliti ingin memperdalam

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 145.

⁶¹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

⁶² Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetb.III, 2007),h. 216.

topik penelitiannya dengan jumlah responden yang sedikit.⁶³

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah pemerintah Desa Kadingeh yang menjadi penanggungjawab dari sistem akuntansi desa dan juga masyarakat Desa Kadingeh yang akan diwawancarai terkait transparansi pemerintah atas terlaksananya realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan Studi literatur tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁴ Pendokumentasian adalah teknik pengumpulan data yang tidak diarahkan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen.⁶⁵ Pengumpulan data dengan teknik dokumenter ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa sumber teks, dokumen dan gambar (foto).

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 137.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 240.

⁶⁵ M. Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghia Indonesia,2002),h. 87.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan atau tinjauan data adalah tahap melihat data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban kalimat, keteraturan teks, kejelasan makna, relevansi data, dan kesesuaian dengan data lainnya.⁶⁶ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap Klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Semua data yang diperoleh kemudian dibaca dan dipelajari secara intensif, kemudian dikategorikan menurut jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁶⁷ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan data yang diperoleh lebih mudah untuk dipelajari dan dibandingkan dengan data tersebut.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses pengecekan data dan informasi yang diperoleh di lapangan agar keabsahan data tersebut dapat diketahui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁶⁸ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

⁶⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁶⁷ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

⁶⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan gambaran dan sintesa dari data dan informasi yang telah dikumpulkan. Tujuannya agar peneliti dapat meningkatkan pemahamannya terhadap data dan kemudian menyajikannya secara lebih jelas kepada orang lain tentang apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁶⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terkait fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisa penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

2. Reduksi Data

⁶⁹ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁷⁰ Miles, Matthew B., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, h .15.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengklasifikasikan, mengorientasikan, mengatur, menghilangkan data yang tidak perlu dan memproses data untuk sampai pada kesimpulan dan verifikasi akhir.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.⁷¹

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis yang paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁷² Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

⁷¹ Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

⁷² Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang

Setiap desa wajib mengelola keuangan desa melalui tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan adanya peraturan kementerian, desa akan lebih terbuka dan bertanggung jawab. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sebagian besar dibiayai oleh pemerintah. Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Desa Kadingeh dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah aplikasi sistem keuangan desa (Siskudes). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan dengan tujuan memaksimalkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini memakai *database* Microsoft Access yang cukup mudah untuk diterapkan oleh pemerintah Desa Kadingeh yang sebagian besar masih awam dengan sistem komputerisasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Umar selaku Kepala Desa Kadingeh:

“Kalau pencatatan penggunaan dana, pengeluaran dan penerimaan dana itu pencatatannya menggunakan Aplikasi Siskeudes. Penggunaan aplikasi siskeudes ini sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa dan realisasi anggaran mulai dari tahap awal perencanaan sampai tahap akhir pelaporan dan pertanggungjawaban”.⁷³

Berdasarkan penjelasan tersebut pemerintah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dan penatausahaan APBDes dalam rangka realisasi anggaran,

⁷³ Umar, S.Pd.I, Kepala Desa Kadingeh, *wawancara* di Kantor Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kadingeh senantiasa berusaha meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, dalam pengelolaannya pengelolaan

Dalam Wawancara bersama bapak Umar Kepala Desa Kadingeh:

“Kendala dalam penggunaan aplikasi siskeudes itu yang pertama jaringan sama kalau ada kesalahan teknis”.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa disamping memberi kemudahan bagi aparat dalam tata kelola pencatatan dan pelaporan tak jarang juga pemerintah desa menemui kendala, hal ini tak lain disebabkan oleh kurangnya pertimbangan teknis dalam aplikasi siskeudes ini, ada baiknya jika aplikasi siskeudes ini dapat diakses secara offline sehingga daerah-daerah pelosok dapat menerapkannya juga. Disamping itu penyuluhan kepada SDM/aparat desa selaku pemakai atau *Brainware* terkait bimbingan teknis penggunaan aplikasi siskeudes ini sangat penting, agar dikemudian hari jika menemui kendala dalam penggunaan aplikasi siskeudes aparat desa tidak kewalahan.

Dalam Wawancara dengan bapak Umar selaku kepala Desa Kadingeh sekaligus Pembina tim penyusun APBDes:

“Jurnal, buku besar, buku pembantu sampai menu pelaporan itu semua ada dalam sistem Aplikasi Siskeudes.”.⁷⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa Menu yang ada dalam Aplikasi siskeudes ini sangat lengkap mencakup unsure-unsur sistem informasi akuntansi yaitu Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, dan Laporan yang terdapat dalam modul aplikasi yang tersusun dengan sistematis mulai dari tahap awal perencanaan sampai dengan tahap akhir pelaporan dan pertanggungjawaban.

⁷⁴ Umar, S.Pd.I, Kepala Desa Kadingeh, *wawancara* di Kantor Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

⁷⁵ Umar, S.Pd.I, Kepala Desa Kadingeh, *wawancara* di Kantor Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

Pengelolaan APBDes terdapat dalam menu-menu yang disediakan oleh aplikasi siskeudes tersebut, Untuk lebih jelasnya berikut ini tabel tahap pengelolaan APBDes beserta dengan penyusun dan penanggungjawabnya:

Tabel 4.1. Pengelola APBDes

Perencanaan	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggung jawaban
Sekretaris Desa	Kasi/Kaur	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Sekretaris Desa
Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kepala Desa
BPD	Kepala Desa		Kepala Desa	
Evaluasi Oleh Pemkab	Kaur Keuangan			

Sumber data: Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dibagi kedalam lima tahap yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1. Perencanaan APBDes
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Enrekang yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Enrekang.⁷⁷

⁷⁶ Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 29.*

⁷⁷ Pemerintah Desa Kadingeh. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Des) Tahun Anggaran 2018-2023.*

Dokumen RPJMDes harus dibuat oleh pemerintah desa atau kepala desa yang terpilih langsung untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa. RPJMDes Kadingeh Periode 2018-2023 disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Kebijakan Program Kepala Desa terpilih, serta perkembangan aspirasi masyarakat Desa Kadingeh.

RPJMDes bukan hanya penjabaran dari rencana pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kadingeh, melainkan rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan Desa Kadingeh dan masyarakat Kadingeh. Sebuah pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan desa bersama selama enam tahun ke depan.

Kepala desa memiliki wewenang untuk membentuk tim penyusun RPJM-DESA Berikut ini Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa) Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2023

Tabel 4.2 Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Desa) Kadingeh

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	UMAR, S.PD.I	Kepala Desa	Pembina
2	TASLIM	Sekretaris Desa	Ketua TIM
3	SIRUNTU	LPM	Sekretaris TIM
4	SANTO	Aparat Desa	Anggota
5	S.PARMAN, S.SOS	Aparat Desa	Anggota
6	SYAMSUL	Aparat Desa	Anggota
7	ERWIN, S.PD.I	Aparat Desa	Anggota

8	SAPARUDDIN	Aparat Desa	Anggota
9	ALMAWATI	Unsur Keterwakilan Perempuan	Anggota
10	SITI AISYAH JEMI, S.PD.I	Unsur Keterwakilan Perempuan	Anggota
11	HASIM	Tokoh Masyarakat	Anggota
12	KENDEN	Tokoh Masyarakat	Anggota

Sumber Data: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Des) Tahun Anggaran 2018-2023

RPJMDes ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Kadingeh menjadi dicapai dalam rangka perwujudan visi dan misi Maksud dan Tujuan RPJMDes Desa Kadingeh meliputi strategi pembangunan desa, kebijakan menyeluruh, rencana dan kegiatan prioritas indikatif, dengan fokus pada: pertama, aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat Desa Kadingeh; kedua, mengikuti waktu dan panduan.

Tujuan disusunnya RPJM-Des Kadingeh 2018-2023 adalah untuk merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan berbagai kepentingan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat untuk lebih memperkuat perwujudan visi kepala Desa Kadingeh, yakni "Terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa Kadingeh yang Jujur, Adil, Teransparan, dan Akuntabel berbasis pelayanan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan Desa yang berdaya saing menuju pemerintahan Desa Kadingeh yang Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Open Governance (pemerintahan yang terbuka)" Selain itu, RPJMDes Kadingeh

bertujuan untuk:⁷⁸

- 1) Melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program pembangunan.
 - 3) Mempertahankan dan memperluas hasil-hasil pembangunan.
 - 4) Membangun dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
 - 5) Memprioritaskan kebijakan dan program pembangunan secara lebih tepat sehingga menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pembangunan.
 - 6) Kesiapan pengembangan program pembangunan akan dilakukan di Desa Kadingeh.
 - 7) Menjadi media dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.
 - 8) Implementasi komitmen bersama antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk program pembangunan desa yang dibiayai oleh APBDes
- RPJMDes Kadingeh disusun setelah pembahasan dan penerimaan yang matang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kadingeh.

Pada aplikasi Siskeudes terdapat menu RPJM desa yang digunakan untuk memasukkan data perencanaan pemerintahan desa, seperti sektor, subzone kegiatan, jenis kegiatan, dan rincian dana.

⁷⁸ Pemerintah Desa Kadingeh. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm-Des) Tahun Anggaran 2018-2023*.



Sumber Data: *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*

Gambar 2.2 Menu Data Rencana Kegiatan Desa Pada Aplikasi Siskeudes

b. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des)

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) ditetapkan melalui musyawarah yang biasa disebut dengan musrembang desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam wawancara dengan warga mengatakan bahwa saat akan pelaksanaan musrembang desa ada pengumuman yang biasanya disampaikan oleh para kepala dusun kepada masyarakat Desa Kadingeh terkait pengadaan MUSREMBANG desa.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) diawali dengan penyusunan rencana pembangunan desa dengan musyawarah, musyawarah ini diselenggarakan oleh Badan Perwusyawaratan Desa (BPD) hasil dari musyawarah tersebut akan dijadikan pedoman bagi aparat desa dan tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP-Des. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Umar selaku kepala

Desa Kadingeh:

“Tentunya dalam perencanaan pembangunan kami senantiasa mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi, dalam musyawarah yang biasa kami sebut dengan musrambang desa masyarakat diberikan kebebasan untuk memberikan usulan terkait pembangunan dan perbaikan didesa, dari usulan-usulan tersebut kami menentukan program-program prioritas yang dianggap sesuai dengan tujuan anggaran dan dianggap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan”⁷⁹

Hal tersebut dibenarkan oleh Samsir yang merupakan masyarakat Desa

Kadingeh:

“Iya, Kalau ada musyawarah biasanya bapak dusun sampaikan kepada masyarakat tapi untuk saya pribadi saya tidak pernah ikut musyawarah karena kesibukan berkebun”⁸⁰

Disamping itu Samperi mengatakan dalam wawancara:

“Pengumuman panggilan pelaksanaan musyawarah desa atau musrembang saya tidak pernah dengar, mungkin yang di panggil itu tokoh masyarakat saja sebagai perwakilan”.⁸¹

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pemerintahan, pemerintah Desa Kadingeh selalu mengikutsertakan masyarakat dengan begitu maka rencana pembangunan yang dibuat akan lebih maksimal karena melihat dan mempertimbangan banyak pendapat dari masyarakat dan pihak yang terlibat, Namun dalam penyuluhan kepada masyarakat untuk ikutserta melakukan musyawarah masih kurang sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih maksimal dalam mengajak masyarakat desa agar terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan termasuk kegiatan pengelolaan dan penganggaran APBDes ini.

⁷⁹ Umar, S.Pd.I, Kepala Desa Kadingeh, *wawancara* di Kantor Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

⁸⁰ Samsir, Warga Desa Kadingeh, *wawancara* di Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

⁸¹ Samperi. Warga Desa Kadingeh, *wawancara* di Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 15 Januari 2022.

Setelah diadakan musyawarah desa dilakukan Pembentukan tim penyusun RKP yang dibentuk oleh kepala desa, tim penyusun ini yang bertugas untuk memeriksa penyelarasan usulan dari hasil musyawarah dengan program-program kegiatan desa dengan mencermati ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) setelah diselaraskan tim penyusun membuat susunan rancangan daftar usulan RKPDes, penyusunan RKPdesa dibuat dengan melakukan musyawrah lanjutan dan setelah disepakati bersama maka selanjutnya RKPDesa akan diperiksa oleh kepala desa selaku pembina tim dan jika diperlukan kepala desa mengarahkan tim penyusun untuk merevisi dokumen-dokumen RKP Desa.

Menu RKP-Desa pada aplikasi siskeudes terdapat tepat dibawah menu RPJM

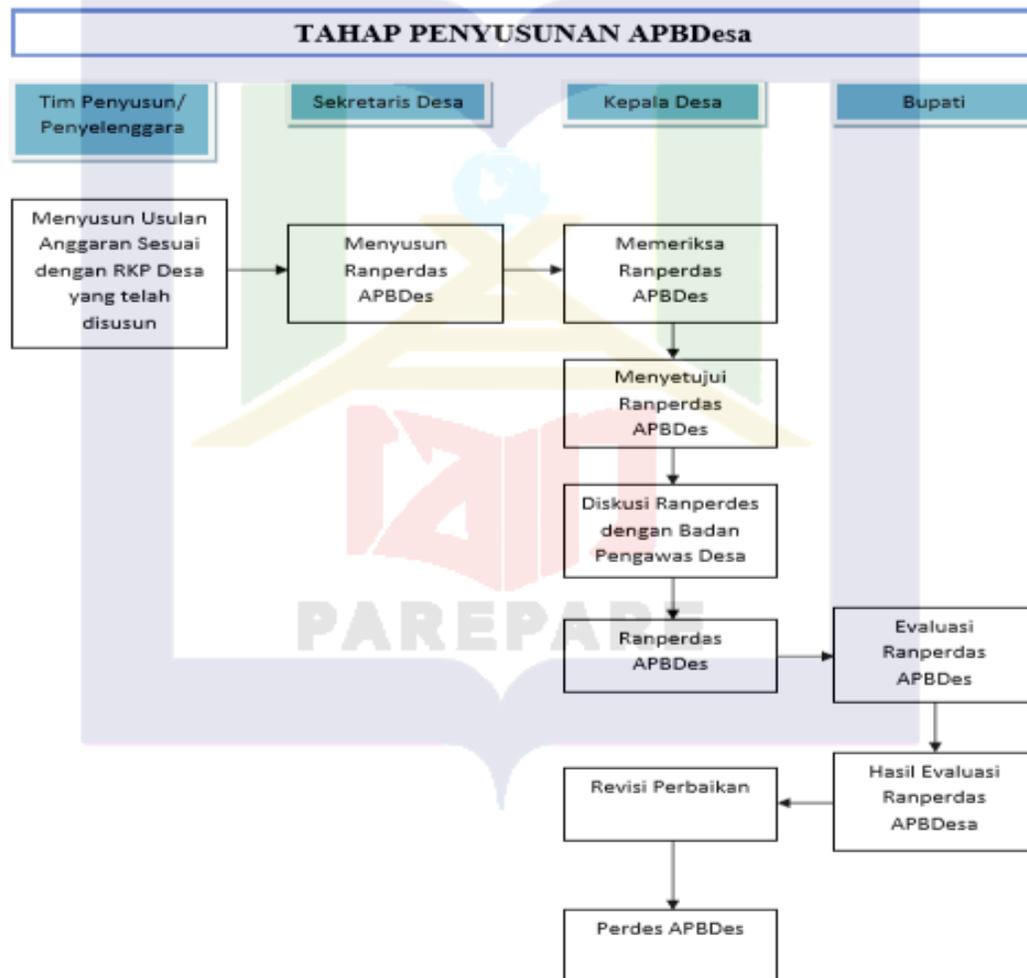
Sumber Data: Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes

2.0)

Gambar 2.3 Menu Perencanaan RPJM Desa Pada Aplikasi Siskeudes

2. Pelaksanaan APBDes

Jika RKP-Desa telah ditetapkan maka selanjutnya adalah proses penyusunan APB desa, Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP-Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran APBDes. Penyusunan APBDes bertujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengidentifikasi secara cermat sumber dana dan pengeluaran atau pengeluaran yang ada untuk pembangunan desa. Berikut ini *Flowchart* Penyusunan APBDes



Gambar 2.4 *Flowchart* Tahap Penyusunan APBDes

SE menteri dalam negeri no. 188.34/5170/sj tanggal 17 september 2020 tentang penyusunan perkada bupati/wali kota mengenai pedoman penyusunan APBDes ta. 2021 bahwa tatacara penyusunan APBDes berdasarkan:⁸²

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan rkp desa,
- b. Prinsip penyusunan apb desa,
- c. Kebijakan Penyusunan Anggaran Desa, dan
- d. Teknik Penyusunan Anggaran Desa
- e. Aktivitas sesuai kewenangan Desa
- f. Penganggaran yang Memadai untuk Masalah yang perlu diprioritaskan seperti Kesiapsiagaan dan penanganan Bencana
- g. Manajemen pascabencana (menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru). Pengaturan untuk pelaksanaan zona bencana, insiden darurat dan manajemen darurat desa dengan biaya tak terduga
- h. Laporan Konsolidasi Sektor ke-5 dan Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- i. Prioritas penggunaan dana desa sesuai ketentuan.

Menu Penganggaran dalam software aplikasi siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dilakukan secara berurut sinkron menu yang tersedia dalam perangkat lunak Siskeudes. software Siskeudes menyediakan menu cetak setelah proses posting. menu Cetak Posting ini menghasilkan 2 output yaitu lembar penilaian dan Proporsi APBDes. lembar

⁸² Republik Indonesia. surat edaran menteri dalam negeri tentang penyusunan perkada bupati/wali kota no. 188.34/5170/sj tanggal 17 september 2020.

penilaian artinya lembaran check list yang dipergunakan evaluator APBDes (Kecamatan atau Dinas PMD) dalam proses mengevaluasi Rancangan APDesa yang diajukan oleh pemerintah desa Menu penganggaran dalam aplikasi sikeudes digunakan dengan tujuan memproses data dalam rangka penyusunan APBDes. Dalam Modul penganggaran pada Aplikasi Siskeudes terdapat delapan menu diantaranya yaitu.⁸³

a. Bidang dan kegiatan

Menu kegiatan dilakukan untuk memilih dan memasukkan catatan untuk bidang, subsektor dan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa yang terlibat dalam kisaran harga tahun berjalan. Menu ini juga dilengkapi dengan atribut kode hobi, sekitar, waktu, panggilan PPKD, output, dan pagu kisaran harga aktivitas.

b. Pendapatan

Menu pendapatan digunakan untuk memasukkan catatan kisaran harga penjualan perangkat Desa. Keuntungan tersebut dapat berupa uang Desa hasil penguasaan Tanah, hasil pengelolaan pasar Desa, hasil usaha Desa lainnya, hasil Swadaya, kisaran harga Desa, Alokasi Dana Desa, dan memberikan keuntungan dari pihak yang berwenang.

c. Belanja

Menu Belanja digunakan untuk memasukkan informasi anggaran pemerintah desa. Item pengeluaran ditentukan oleh bidang, sub-sektor dan kegiatan yang akan dilakukan.

d. Pembiayaan 1 (penerimaan pembiayaan)

Menu Pembiayaan 1 memungkinkan untuk memasukkan statistik tentang

⁸³ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*. 2018,. h. 34-46

penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa juga dapat mencakup antara lain hasil penjualan barang milik desa yang dipisahkan dan pencairan kisaran harga cadangan.

e. Pembiayaan 2 (pengeluaran pembiayaan)

Menu Pembiayaan 2 digunakan untuk memasukkan input pengeluaran biaya Pembiayaan. Harga pembiayaan dapat berupa Penyertaan Modal Desa di BUMDes.

f. Anggaran Kas Desa

Menu ini digunakan untuk memasukkan informasi Rencana anggaran uang desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAK Desa) adalah berkas yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan kisaran harga dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran yang didasarkan seluruhnya pada DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

g. Kebijakan Apbdes

Menu ini digunakan untuk memasukkan statistik pedoman APBDes Desa, pedoman Kepala Desa Penyusunan APBDes dan kebijakan tugas APBDes Desa. Dengan menu ini, utilitas Siskeudes akan secara rutin membuat format Perdes/Perkades dalam bentuk frase yang dapat diedit/disesuaikan melalui perangkat desa.

h. Posting APBDes

Menu Posting APBDes digunakan untuk memposting informasi tentang rancangan APBD, APBD asli 12 bulan, dan APBD revisi. Data yang perlu dicantumkan dalam layar APBDes adalah nomor peraturan desa dan tanggalnya. Menu menampilkan informasi kisaran harga yang dijalankan oleh administrator yang ditunjuk untuk mengevaluasi pedoman desa untuk APBDes di tingkat kabupaten atau

provinsi/kota. kemudian dikunci dan arsip yang diterbitkan dikembalikan ke desa untuk dijadikan dasar pelaporan dan dokumen realisasi APBDes.



Sumber Data: *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes*

2.0)

Gambar 2.5 Menu Perencanaan dan Penganggaran APBDes Pada Aplikasi Siskeudes

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang berlangsung hampir satu tahun anggaran. Kegiatan ini dibangun di atas tugas dan tanggung jawab bendahara. Kesabaran dan ketelitian sangat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas ini. Administrasi adalah pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, selama satu tahun anggaran. Para pengelola keuangan desa khususnya bendahara harus memahami beberapa aturan pokok pengelolaan, agar kegiatan administrasi dapat dilaksanakan dengan benar dan tertib. yang harus disiapkan seelum

melakukan prosedur administrasi menggunakan Aplikasi Siskeudes yang memenuhi parameter rekening ank desa. Parameter Rekening Bank Desa harus ditambahkan seelum melakukan proses administrasi.

The screenshot displays the 'PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA' menu in the Siskeudes application. The interface is titled 'PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI' and 'PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA'. On the left, there is a list of menu items with radio buttons: 'Buku Kas Umum' (selected), 'Buku Pembantu Kas Tunai', 'Buku Pembantu Bank', 'Buku Pembantu Penerimaan', 'Buku Pembantu Kegiatan', 'Buku Pembantu Pajak', 'Buku Pembantu Pajak Rekap', 'Buku Pembantu Pajak per Jenis', 'Buku Pembantu Panjar', 'Register SPP Pengeluaran', and 'Register Kwitansi Pembayaran'. On the right, there are input fields for 'Tanggal' (01/01/2019 s.d 31/12/2019), 'Kecamatan' (01 KECAMATAN MARGASARI), and 'Desa' (01.2001. PEMERINTAH DESA SIMULASI). A 'Footer' field contains 'XYZ, 15 Oktober 2018'. At the bottom, there are buttons for 'Print To File', 'Cetak', and 'Keluar'.

Sumber Data: Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)

Gambar 2.6 Menu Penatausahaan Keuangan Desa Pada Aplikasi Siskeudes

Ada beberapa tahap dan menu yang terdapat dalam modul penatausahaan pada aplikasi siskeudes diantaranya sebagai berikut:

a. Persiapan Penatausahaan

Hal yang harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa. Parameter Rekening Bank Desa harus ditambahkan sebelum proses penatausahaan

dilaksanakan

b. Penatausahaan Penerimaan

Pada Aplikasi Siskeudes ini Penerimaan desa dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan desa yang diterima melalui bank. Selain itu, Pelaksana Kegiatan dapat menerima pendapatan Swadaya berupa uang yang harus disetorkan kepada Kaur Keuangan.

1) Penerimaan Tunai

Pada penerimaan tunai Kaur Keuangan menerima pendapatan desa secara tunai dari masyarakat atas Pendapatan Asli Desa. Penerimaan tunai ini wajib disetorkan tersebut lebih dahulu ke Rekening Kas Desa dan tidak boleh langsung digunakan

2) Penyetoran

Uang penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh Kaur Keuangan harus disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Desa dan tidak boleh langsung digunakan. Data penerimaan tunai otomatis oleh aplikasi masuk dalam daftar uang yang harus disetorkan pada menu penyetoran.

3) Penerimaan Bank

Penerimaan pendapatan desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diinput ke menu Penerimaan Bank.

c. Penatausahaan Pengeluaran

Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja di desa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari Pejabat Pelaksana Keuangan Desa (PPKD). Dalam aplikasi ini SPP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.

d. Pencairan SPP

Menu Pencairan SPP digunakan untuk mencairkan uang dari Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Menu ini digunakan untuk seluruh jenis SPP baik SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan yang telah disetujui oleh Kepala Desa

e. Penyetoran Pajak

Menu penatausahaan pajak digunakan untuk melakukan penyetoran pajak yang telah dipungut melalui bukti kuitansi pembayaran. Satu SSP hanya dapat digunakan untuk menyetorkan satu jenis pajak. Satu SSP bisa terdiri dari kumpulan potongan pajak dari beberapa nomor bukti pengeluaran. Sebagai contoh penyetoran pajak honorarium narasumber atas 5 (lima) kuitansi pembayaran honor dari narasumber yang berbeda dapat dikumpulkan dalam satu SSP

f. Mutasi Kas

Menu mutasi kas digunakan untuk mencatat mutasi pergeseran saldo kas desa. Menu Mutasi Kas terdiri dari Menu Pengambilan dan Menu Penyetoran. Menu Pengambilan digunakan untuk mencatat pengambilan uang dari Bank yang dipindahkan ke Kas Tunai di Kaur Keuangan. Menu Penyetoran digunakan untuk mencatat perpindahan uang dari Kas Tunai di Kaur Keuangan ke Rekening Kas Desa.

g. Laporan Penatausahaan

Menu Laporan Penatausahaan digunakan untuk mencetak laporan penatausahaan keuangan desa, terdiri dari Buku Kas Umum Desa, Buku Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, dan Buku Pembantu Pajak. Selain itu juga ditambahkan register SPP dan register kuitansi

pembayaran.⁸⁴

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan langkah terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan kinerja APBD DesaKadingeh yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Enrekang setelah berakhirnya tahun anggaran pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati/walikota melalui Camat. Selain itu, kepala desa menyampaikan laporan pembukuan pelaksanaan anggaran desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut diwajibkan oleh Peraturan Desa yang menyertai Laporan Keuangan termasuk Laporan Kinerja APBD dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam modul aplikasi Siskeudes ini :

- a. Laporan kinerja anggaran dihasilkan melalui modul administrasi dengan pencatatan otomatis dari sistem aplikasi.
- b. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- c. Menu Penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.
- d. Menu Penyesuaian juga memungkinkan untuk memeriksa serta mengubah pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan sesuai dengan yang dicatat dengan

⁸⁴ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*. 2018,. h. 66-112

jelas.

Menu Laporan Pembukuan yang ada dalam aplikasi siskeudes digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Desa
- b. Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
- c. Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran)
- d. Laporan Kekayaan Milik Desa
- e. Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana
- f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- g. Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225.

B. Analisis Akuntansi Syariah terhadap Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang

Asas pengelolaan keuangan Desa yang terdapat dalam Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2. Ayat 1 Menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel serta tertib hal ini sejalan dengan Prinsip Akuntansi Syariah. Ada beberapa prinsip akuntansi syariah diantaranya adalah:

1. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Tanggung jawab adalah keharusan untuk menanggung konsekuensi dari perilaku seseorang dalam menanggapi suatu masalah. Akuntabilitas berhubungan langsung dengan konsep kepercayaan. Dalam konsep pertanggungjawaban segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak didunia maka

akan di hisab diakhirat kelak, sehingga pertanggungjawaban memiliki urgensi yang paling utama dalam menjalankan setiap bidang kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Isra/17: 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.⁸⁵

Berdasarkan ayat tersebut Dalam melakukan kegiatan bisnis dan akuntansi, mereka yang bergerak dalam kegiatan bisnis harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diberi wewenang dan dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam penerapannya, Pemerintah Desa Kadingeh selalu menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan menggunakan dokumen komputer dan dokumen manual yaitu buku laporan pertanggungjawaban, Menyusun laporan kinerja APBDes dalam hal pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. dalam APBDes, dikelola oleh bendahara desa dan tim pengelola operasi (TPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa sudah melalui mekanisme sesuai ketentuan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan sebagaimana wawancara dengan Bapak Umar Selaku kepala desa:

“Upaya pemerintah dalam hal pertanggungjawaban yaitu pengadaan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat secara manual dalam buku LPJ yang

³³Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Isra: 36.

kemudian dilaporkan kepada bupati setiap tanggal 31 Desember setiap tahun kalau untuk lalu berusaha transparan dalam penggunaan APBDes salah satunya dengan menggunakan spanduk realisasi APBDes yang kemudian dipajang di halaman kantor Desa Kadingeh, namun untuk saat ini pengadaan spanduk yang baru sedang diusahakan oleh pemerintah Desa Kadingeh”.⁸⁶

2. Prinsip Keadilan

Asas Keadilan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keselarasan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, pemerataan adalah suatu kondisi di mana setiap orang menikmati apa yang menjadi haknya dan setiap orang berbagi sama dalam kebaikan bersama. Perintah untuk berlaku adil ini tertuang dalam Al-Quran Q.S. Al-Hasyr/59:7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya..⁸⁷

Pada Q.S. Al-Hasyr/59:7 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati apa yang diperintahkan kepada kita tanpa memperseksikannya, salah satu perintah yang terkandung dalam ayat ini yaitu perintah untuk berlaku adil dan juga pemerataan dalam pendistribusian kekayaan. Prinsip keadilan ini bukan hanya nilai yang sangat penting dalam etika sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat pada

⁸⁶ Umar, S.Pd.I, Kepala Desa Kadingeh, wawancara di Kantor Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

⁸⁷Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Hasyr: 7.

sifat manusia. Untuk pemerintahan desa prinsip ini dapat menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan dan mendistribusikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar merata dan sesuai dengan prioritas yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa merampas hak atau merugikan pihak lain. Dalam Pencatatannya pemerintah Desa Kadingeh selalu berpijak pada nilai-nilai syariah dan moral, sederhana dan mempertahankan nilai keadilan dengan pencatatan yang benar setiap transaksi yang dilakukan secara adil, tidak berlebihan dan tidak dikurangi dalam penginputan data transaksi seperti penerimaan dan pengeluaran dalam aplikasi siskeudes pemerintah Desa Kadingeh senantiasa mengikutsertakan bukti transaksi yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Umar Selaku Kepala Desa Kadingeh:

“Rincian transaksi pengeluaran atau pendapatan dana desa yang terjadi langsung dicatat kalau tidak langsung dimasukkan ke laptop biasanya dicatat dibuku baru kemudian dimasukkan kedalam aplikasi supaya data yang dicatat sesuai dengan apa yang terjadi, karena kalau tidak langsung dicatat bisa jadi bukti transaksi yang sudah dilakukan tidak sesuai sama yang dikeluarkan atau diterima”.⁸⁸

3. Prinsip Kebenaran

Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk jujur, ikhlas dan benar dalam segala bidang kehidupannya dan ini sangat dibutuhkan dalam bidang bisnis syariah. Kejujuran tercermin dari kemampuan menjalankan amanah yang diberikan. Orang yang jujur pasti dapat dipercaya dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya, ketidakjujuran adalah bentuk penipuan yang paling buruk sehingga banyak ayat yang melarang melakukan penipuan dan menyebabkan kerusakan dalam tatanan umat hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Q.S. Al-Syu'ara/26:181-183 yang

⁸⁸ Umar, S.Pd.I, Kepala Desa Kadingeh, wawancara di Kantor Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Terjemahnya:

181. sempurnakanlah takaran dan ianganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan: 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan ianganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan ianganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁸⁹

Kegiatan akuntansi akan dilaksanakan dengan benar apabila dilandasi oleh nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan nilai wajar dalam pelaporan dan pelaksanaan kegiatan akuntansi. Oleh karena itu, dalam perkembangan akuntansi syariah, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus selalu diwujudkan dalam praktik akuntansi.⁹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Umar selaku kepala Desa

Kadingeh:

“Pencatatan terkait APBDes ini sebagian besar dilakukan oleh sekretaris desa berdasarkan bukti yang ada biasa berupa blangko atau kertas bukti pengeluaran atau penerimaan, kalau untuk laporan ada yang namanya LPJ ini dalam bentuk pembukuan manual ada juga laporan yang dimasukkan kedalam Aplikasi Siskeudes, tentunya lapiran-laporan yang dibuat sesuai dengan data dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan ada data pendukung termasuk data foto atas penggunaan anggaran tersebut”.⁹¹

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh memiliki Kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk didalamnya kebenaran menyangkut pengukuran penerimaan, penyeteroran, dan laporan keuangan dan pembukuan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Namun, dalam menyebarluaskan informasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kadingeh masih dapat dikatakan kurang karena saat ini pengadaan

⁸⁹ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Syu'ara:181-183

⁹⁰ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi syariah*, (Medan: Penerbit Madenatera, 2016)., h. 17.

⁹¹ Umar, S.Pd.I, Kepala Desa Kadingeh, wawancara di Kantor Desa Kadingeh Kab. Enrekang, 09 Januari 2022.

sapanduk baru untuk tahun berjalan masih direncanakan, disamping itu pemerintah Desa Kadingeh belum membagikan informasi pengelolaan APBDes kedalam media baik berupa media internet dan semacamnya agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pengelolaan APBDes tentunya sulit untuk sesuai dengan standar yang professional namun pemerintah Desa Kadingeh telah berupaya mengoptimalkan tata kelola APBDes ini salah satunya yaitu dengan menggunakan *Software* yang dianggap dapat lebih mengoptimalkan tata kelola APBDes dalam hal ini yaitu Aplikasi Siskeudes.

Kebaruan dari hasil penelitian ini yaitu, pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini belum menganalisis Sistem Akuntansi yang digunakan oleh pemerintah desa dengan Analisis Akuntansi Syariah, selanjutnya pada penelitian sebelumnya pembahasan dan hasil penelitian lebih berfokus pada tahapan pengelolaan keuangan desa sedangkan dalam penelitian ini pembahasan lebih diperluas lagi dengan interpretasi yang lebih baru yaitu modul dan tahapan yang ada pada aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan oleh pemerintah desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Desa Kadingeh dalam pengelolaan keuangannya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam aplikasi ini terdapat empat tahap menu pengelolaan APBDes yaitu menu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan menu pelaporan. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Aplikasi Siskeudes ini memudahkan pemerintah Desa Kadingeh dalam penatausahaan dan pengelolaan penganggaran APBDes.
2. Sistem Informasi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Kadingeh dalam kegiatannya selalu berupaya melibatkan masyarakat untuk ikut serta bermusyawarah dan memberikan usulan terkait perencanaan dan pengelolaan APBDes agar dapat tersampaikan bentuk transparansi pengelolaan APBDes kepada masyarakat.

B. Saran

1. Saran Untuk Pemerintah Desa Kadingeh
Upaya pemerintah dalam memaksimalkan kualitas pengelolaan keuangan sangat baik, Namun ada baiknya jika pemerintah Desa Kadingeh lebih meningkatkan edukasi dan pemahaman kepada sumber daya manusia atau aparat pemerintahan Desa Kadingeh melalui sosialisasi petunjuk teknis agar lebih memahami aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diterapkan sehingga kedepannya jika menemui kendala dapat diatasi. Selanjutnya untuk transparansi pengelolaan

APBDes oleh pemerintah kadingeh sudah cukup baik, Namun untuk lebih optimalnya diharapkan pemerintah desa secepatnya membuat spanduk realisasi anggaran APBDes.

2. Saran Untuk Masyarakat Desa Kadingeh

Dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah Desa Kadingeh, masyarakat Desa Kadingeh diharapkan untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah seperti kegiatan musyawarah maupun kegiatan pembangunan yang diadakan oleh aparat desa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku:

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Ardana, Cenik dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsito. 1995.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Bintarto, R. *Desa-Kota*, Bandung: Alumni, 1986.
- Bodnar, George and Hopwood, Wilham S, *Accounting Information System, 9th Edition*. New Jersey: Prentice-Hall. Inc, 1998.
- Daldjoeni, N. *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Damin, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Jeffery, Lonnie dan Kevin. *Metode Desain dan Analisis Sistem, edisi 6*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Kansil, Christine St. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo. 1996.
- Khaddafi, Muammar dkk. *Akuntansi syariah*, Medan: Penerbit Madenatera. 2016.
- Krismanji, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Upm Stim Ykpn, 2015, 2016.

- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Jakarta: Erlangga. 2013.
- Miles, Matthew B., “*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*”/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1993.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Republik Indonesia, PP No.43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pasal 1 Ayat 2.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Romney, Marshall B. Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems, Terj. Kikin Sakinah Nur Safira, Novita Puspitasari*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Rosidi, Imron. *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: PT. Alfina Primatama. 2011.
- Satori, Djama’an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo. 2002.
- Setyawati , V. Devina Setyawati, Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2019.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.

- Sukmadinata, M. Iqbal. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Sukmadinta, Nana Syaodih. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetb.III. 2007.
- Sumarsan, T. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: PT Indeks. 2017.
- Sumpeno, Wahjudin. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*, Banda Aceh: Read. 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Sutabri, Tata. *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.
- TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Wijaya, David. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018.
- Wilkinson, J.W. *Accounting Information System: Essential Concepts and Applications*. Australia: John Wiley & Sons, Inc. 2000.
- Zubair Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Skripsi dan Jurnal:

- Arief, Khozin “*Model Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa*”. Sigma-Mu. Vol.10 No.1, Maret 2018.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*. 2018.
- Ismail, Muhammad. Widagdo, Ari Kuncara. & Widodo, Agus. “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 19 No. 2, Agustus 2016.
- Mardiana, Gede Eka Putra, Ni Kadek Sinarwati, dan Ananta wikrama Tungga Atmadja. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di*

Kecamatan Susut". e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1. Volume: 2 No. 1. 2014.

Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo. "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*". Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. 2013.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5058/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ALFINA
Tempat/ Tgl. Lahir : TIKTOK, 31 AGUSTUS 2000
NIM : 18.2800.057
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VII (TUJUH)
Alamat : DUSUN TI TOK, KEL. KADINGEH, KEC. BARAKA, KAB.
ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN APBDes PEMERINTAH DESA
KADINGEH (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

21 Desember 2021
Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair



KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 28 Desember 2021

Nomor : 661/DPMPTSP/IP/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Kadingeh
Di-
Kec. Baraka

Berdasarkan surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare, Nomor: B.5058/In.39.8/PP.00.9/12/2021, tanggal 21 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Alfina**
Tempat Tanggal Lahir : **Tiktok, 31 Agustus 2000**
Instansi/Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Dusun Ti tok Desa Kadingeh Kec. Baraka**

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (Analisis Akuntansi Syariah)."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 28 Desember 2021 s/d 28 Januari 2022

Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala Dinas P.M. Kab. Enrekang



Dr. Ir. NAIDAR BILU ST.MT
Pangkat & Penanda
Nip . 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan)
2. Kepala BAKESBANG-POL Kab. Enrekang.
3. Camat Baraka.
4. Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).
5. Yang Bersangkutan (Alfina).
6. Peninggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
DESA KADINGEH**

Alamat ; Jln. Poros Baraka-Bungin email: desakadingeh@gmail.com Kode Pos 91753
KADINGEH

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 001/DK/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Kadingeh
Alamat : Deakaju, Desa Kadingeh Kecamatan Baraka
Kabupaten Enrekang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFINA
Tempat/Tgl : Tiktok, 31 Agustus 2000
Istansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Ti tok, Desa Kadingeh Kec. Baraka

Benar-benar telah melakukan **Penelitian** di Kantor Desa Kadingeh yang berlokasi di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Pada Tanggal 28 Desember 2021 s/d 28 Januari 2022. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan skripsi dengan judul "**SISTEM INFORMASI AKUTANSI PENGELOLAAN APBDES PEMERINTAH DESA KADINGEH (Analisis Akutansi Syariah).**"

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kadingeh, 29 Januari 2022

Kepala Desa Kadingeh



UMAR, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar, S-Pd. I
Umur : 39 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Kadingeh

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alfina yang melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (Analisis Akuntansi Syariah)”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kadingeh, 09 Januari 2022

Yang Bersangkutan


Umar, S-Pd. I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

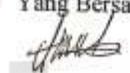
Nama : Samperi
Umur : 34 Tahun
Jabatan : Warga Desa Kadingeh

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Alfina yang melakukan penelitian dengan judul "**Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (Analisis Akuntansi Syariah)**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kadingeh, 15 Januari 2022

Yang Bersangkutan


Samperi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsir
Umur : 27 Tahun
Jabatan : Warga Desa Kadingeh

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Alfina** yang melakukan penelitian dengan judul **"Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (Analisis Akuntansi Syariah)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kadingeh, 09 Januari 2021

Yang Bersangkutan



Samsir

PAREPAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaila
Umur : 19 Tahun
Jabatan : Warga Desa Kadingeh

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Alfina** yang melakukan penelitian dengan judul **"Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (Analisis Akuntansi Syariah)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kadingeh, 18 Januari 2022

Yang Bersangkutan


Nurlaila

PAREPARE



NAMA MAHASISWA: ALFINA
NIM : 18.2800.057
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN
APBDES PEMERINTAH DESA KADINGEH
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (analisis akuntansi syariah). Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

A. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes yang diterapkan?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes memberikan kemudahan dalam manajemen APBDes?
3. Apakah ada kendala atau masalah yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi akuntansi yang diterapkan?
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pembentukan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa?
6. Apakah terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa, dan masyarakat terkait APBDes?
7. Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan penatausahaan dan pengelolaan APBDes?
8. Bagaimana pemerintah desa menanggapi usulan-usulan masyarakat saat diadakan Musrembang?
9. Apakah Dalam pencatatan penggunaan anggaran ada bukti atau formulir transaksi?
10. Apakah ada jurnal transaksi, buku besar, buku pembantu, laporan dalam penatausahaan APBDes?

11. Bagaimana Upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terkait alokasi APBDes?
12. Apakah Pelaporan dan Pertanggungjawaban terkait APBDes sudah sesuai dengan Standar yang berlaku?

Wawancara Untuk Masyarakat Desa

A. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah masyarakat ikut serta dalam penyusunan perencanaan APBDes?
2. Apakah terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa, pengurus dan masyarakat terkait kegiatan penganggaran APBDes desa kadingeh?
3. Apakah anda pernah mengikuti Musyawarah yang diadakan oleh pemerintah Desa?
4. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa kadingeh?
5. Bagaimana pendapat anda terkait transparansi realisasi APBDes Kadingeh?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ALFINA
 N I M : 18.2800.057
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN APBDES PEMERINTAH
 DESA KADINGEH (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

Telah diganti dengan judul baru:

**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN APBDES PEMERINTAH
 DESA KADINGEH KABUPATEN ENREKANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

dengan alasan / dasar:

.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Firman, M.Pd.

Parepare, 4 Maret 2022

Pembimbing Pendamping

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Profil Desa Kadingeh

Desa Kadingeh terbentuk pada tahun 2002 dan merupakan hasil dari pemekaran dari desa Banti pada saat itu Desa kadingeh dipimpin oleh Tahir Silasa Ba yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Kecamatan Baraka . Desa Kadingeh terdiri dari empat dusun antara lain : - Dusun Ti,tok - Dusun Deakaju - Dusun Asaan - Dusun Lombon

a. Kondisi Geografis & Demografi

Geografis Desa Kadingeh terletak 100 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, atau 13 Km dari Ibukota Kecamatan Baraka dengan luas wilayah 1213 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Janggurara
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulo Kec Bungin
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ledan Kec Buntu Batu
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banti

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Kadingeh terdiri dari : Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d Juli, musim kemarau antara bulan September s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Juli s/d Agustus.

c. Tingkat Pendidikan

Tabel Tingkat Pendidikan

TDK TAMAT SD	SD	SMP	SLTA	SARJANA	MEGISTER
32	385	103	91	17	1

d. Mata Pencaharian

Tabel Mata Pencaharian

PETANI/ TAMBAK	PEDAGANG	PNS	BURUH
570	18	9	0

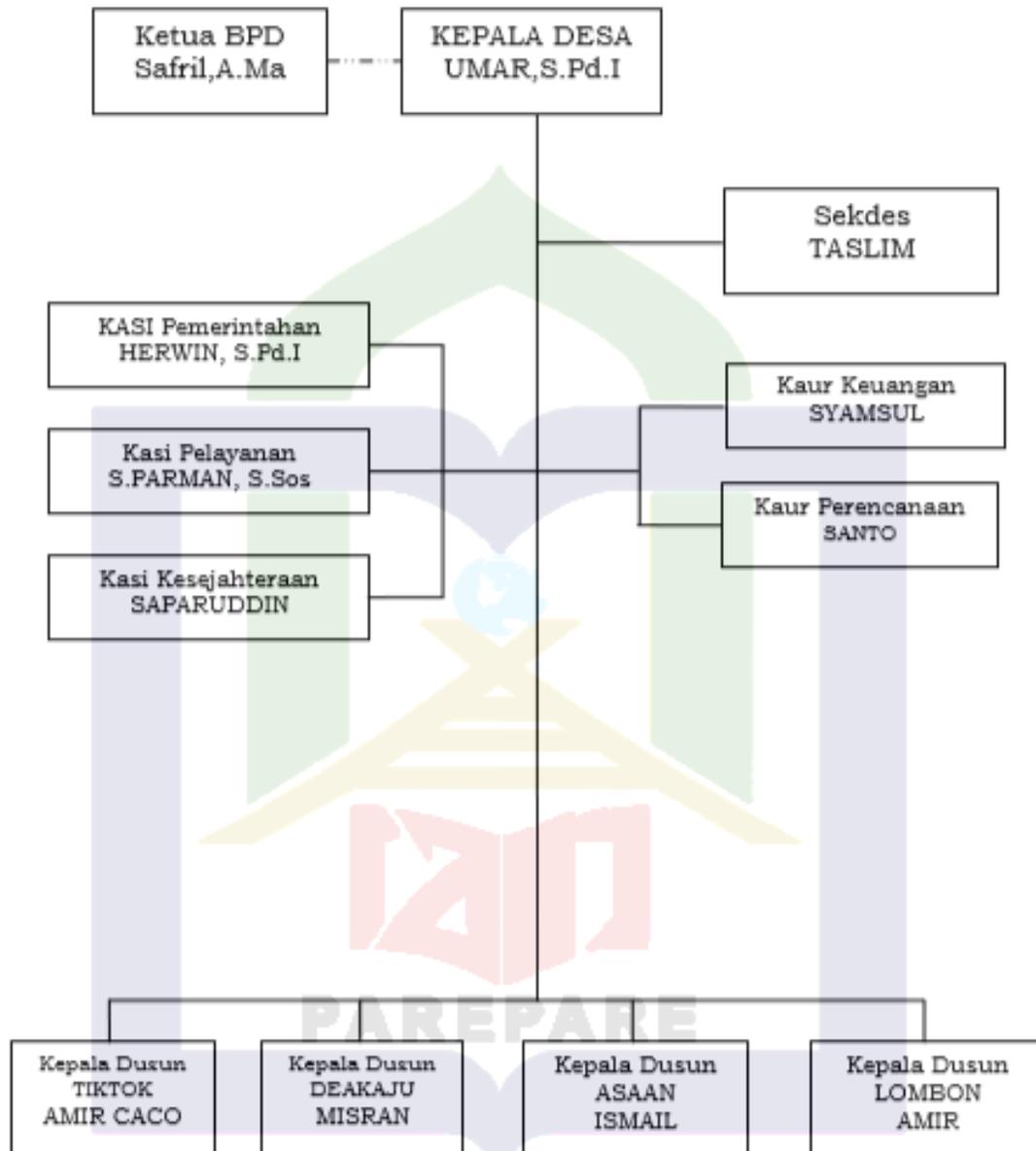
e. Sarana dan Prasarana Desa

Kantor BPD	Kantor Desa	Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Masjid	Sekolah
-	1 Bh	1Bh	Km	9 Km	5 Km	4 Bh	7 Bh

f. Jumlah Penduduk

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1.	TITOK	221	213	434	105
2.	DEAKAJU	269	239	508	140
3.	ASAAN	123	121	244	54
4.	LOMBON	208	216	424	92
Jumlah		821	789	1.610	391

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kadingeh



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KADINGEH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA
 PEMERINTAH DESA KADINGEH
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			ANGGARAN	SUMBER DANA
		Vol.	Satuan	Angka Satuan		
1	2	4	5	6	7	8
a	b	c	d	e	f	g
4	PENDAPATAN				1.716.696.438	
4 1	Pendapatan Asli Desa				988.077	
4 1 1	Hasil Usaha Desa			988.077	988.077	PAD
4 2	Pendapatan Transfer				1.708.611.217	
4 2 1	Dana Desa	1	Tahun	1.218.722.000	1.218.722.000	DDG
4 2 2	Bantuan dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	1	Tahun	19.855.717	19.855.717	DBH
4 2 3	Alokasi Dana Desa	1	Tahun	474.033.000	474.033.000	ADD
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi					
4 2 5	Bantuan Keuangan Kabupaten					
4 3	Penyertaan Lain-lain				7.097.144	
4 3 1	Penyertaan dari hasil kerjasama Antar Desa					
4 3 2	Penyertaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga					
4 3 3	Penyertaan berbasis dari perusahaan yang berkedudukan di desa					
4 3 4	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya					
4 3 8	Durasi Bank					
4 3 8 1	Durasi Bank	1	Tahun	2.992.144	2.992.144	
4 3 8 2	Lain-lain penyelesaian desa yang sah					
4 3 8 2 1	Pengembalian Dana Atas Temuan Tahun 2017	1	Tahun	4.105.000	4.105.000	
	JUMLAH PENDAPATAN				1.716.696.438	
8	BELAJA				1.796.626.118	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				476.388.118	ADD-PAD
1 1	5 Penyelenggaraan Belanja Rutup, Tunjangan dan Operasional Desa				449.778.112	ADD
1 1 1	5 1 Belanja Pegawai				368.878.090	
1 1 1 1	5 1 1 Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa				46.050.000	ADD
1 1 1 1 1	5 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa				36.000.000	
1 1 1 1 1 1	- Kepala Desa	12	Orb	3.000.000	36.000.000	
1 1 1 1 2	5 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa				30.000.000	
1 1 1 1 2 1	- Kepala Desa	12	Orb	2.500.000	30.000.000	
1 1 1 2	5 1 2 Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa				287.700.000	ADD
1 1 1 2 1	5 1 2 1 Penghasilan Tetap Perangkat Desa				245.700.000	
1 1 1 2 1 1	- Sekretaris Desa	12	Orb	2.000.000	27.000.000	
1 1 1 2 1 2	- Kepala Urusan II Orasat	24	Orb	2.025.000	48.600.000	
1 1 1 2 1 3	- Kepala Seksi II Orasat	36	Orb	2.075.000	72.900.000	
1 1 1 2 1 4	- Kepala Dusun II Orasat	48	Orb	1.075.000	47.200.000	
1 1 1 2 2	5 1 2 2 Tunjangan Perangkat Desa				12.000.000	
1 1 1 2 2 1	- Sekretaris Desa	12	Orb	800.000	6.000.000	
1 1 1 2 2 2	- Kasir Keuangan	12	Orb	250.000	3.000.000	
1 1 1 2 2 3	- Kasir Perencanaan	12	Orb	300.000	3.600.000	
1 1 1 3	5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa				17.578.080	
1 1 1 3 1	5 1 3 1 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa				2.246.400	
1 1 1 3 1 1	- Kepala Desa	12	Orb	187.200	2.246.400	
1 1 1 3 2	5 1 3 2 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa				15.331.680	
1 1 1 3 2 1	- Sekretaris	12	Orb	122.400	1.684.800	
1 1 1 3 2 2	- Kasir Keuangan	12	Orb	125.360	1.636.320	
1 1 1 3 2 3	- Kasir Perencanaan	12	Orb	125.360	1.636.320	
1 1 1 3 2 4	- Kasir Pelaksanaan	12	Orb	125.360	1.636.320	
1 1 1 3 2 5	- Kasir Kependidikan	12	Orb	125.360	1.636.320	
1 1 1 3 2 6	- Kepala Dusun 4 Orasat	48	Orb	125.360	6.065.280	
1 1 1 4	5 1 4 Tunjangan BPD				27.600.000	ADD
1 1 1 4 1	5 1 4 1 Tunjangan Kinerja BPD				27.600.000	
1 1 1 4 1 1	- Ketua	12	Orb	200.000	6.000.000	
1 1 1 4 1 2	- Wakil Ketua	12	Orb	350.000	4.200.000	
1 1 1 4 1 3	- Sekretaris	12	Orb	200.000	2.400.000	
1 1 1 4 1 4	- Anggota B Orasat	72	Orb	200.000	14.400.000	
1 1 4	5 2 Perencanaan Operasional Pemerintah Desa (ATE, Honor PPKD dan PPKD 4H)				77.484.832	ADD-DBH-80%
1 1 4 1	5 2 1 Belanja Barang dan Jasa				77.454.532	80%
1 1 4 1 1	5 2 1 1 Belanja Barang Perencanaan				15.656.217	DBH
1 1 4 1 1 1	5 2 1 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				6.781.217	
1 1 4 1 1 1 1	- Kertas HVS 70 Gram	9	Buah	60.000	540.000	
1 1 4 1 1 1 2	- Tinta printer Brother Hitam	2	Betul	120.000	360.000	
1 1 4 1 1 1 3	- Tinta printer Brother Warna	1	Betul	180.000	180.000	
1 1 4 1 1 1 4	- Buku Felo Kili	8	Buah	30.000	240.000	
1 1 4 1 1 1 5	- Map Duesse P16	10	Buah	7.000	70.000	
1 1 4 1 1 1 6	- Map Buzdet 88	8	Buah	80.000	250.000	

3	3	3	Belanja Modal Peralatan Komputer				8.000.000	
			- Laptop Asus	1	Unit		8.000.000	
1	4		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				10.109.997	ADD-PAD
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDes				6.762.570	ADD
		3	Belanja Barang dan Jasa				6.762.570	
		3	Belanja Barang Perencanaan				2.427.570	
		3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				464.270	
			- Kertas HVS 70 Gram	8	Ream	50.000	200.000	
			- Buku Folio	1	Daah	30.000	30.000	
			- Henti Kertil	1	Daah	30.000	30.000	
			- Iai Hantar	1	Daah	5.000	5.000	
			- Pulpen Stowman	1	Ream	30.000	30.000	
			- Penyal	1	Daah	2.270	2.270	
			- Map File	1	Daah	7.000	7.000	
		3	Cetak, Pengandaian dan Foto Copy				223.300	
			- Foto Copy	274	Lembar	400	111.300	
			- Jilid Buku	8	Daah	20.000	160.000	
		3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.800.000	
			- Nasi Kotak	60	Setak	30.000	1.800.000	
			- Snack	60	Setak	30.000	600.000	
		3	Belanja Jasa Honorarium				4.338.000	
		3	Belanja Jasa Honorarium Pegawai				4.338.000	
			- Bendahara	3	GB	200.000	600.000	
			- Kabas	3	GB	175.000	525.000	
			- Sekretaris	2	GB	150.000	450.000	
			- Anggota 25 Orang	24	GB	118.000	2.760.000	
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPP dll)				2.259.350	ADD
		3	Belanja Barang dan Jasa				2.259.350	
		3	Belanja Barang Perencanaan				2.259.350	
		3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				628.000	
			- Kertas HVS 70 Gram	7	Ream	50.000	420.000	
			- Henti Kertil	1	Daah	30.000	30.000	
			- Iai Henti Kertil	3	Ream	5.000	15.000	
			- Map File	2	Daah	7.000	14.000	
			- Penyaji Kertas	8	Daah	3.000	9.000	
			- Kertas	2	Daah	20.000	40.000	
			- Papan Kertas	1	Set	10.000	10.000	
			- Buku Folio	2	Daah	30.000	60.000	
			- Pulpen Stowman	1	Daah	30.000	30.000	
		3	Cetak, Pengandaian dan Foto Copy				171.500	
			- Foto Copy	200	Lembar	400	80.000	
			- Jilid Buku	4	Daah	20.000	80.000	
		3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.560.000	
			- Nasi Kotak	30	Setak	30.000	1.000.000	
			- Snack	30	Setak	30.000	900.000	
			- Air Mineral	1	Ream	20.000	60.000	
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat				968.077	PAD
		3	Belanja Barang dan Jasa				968.077	
		3	Belanja Barang Perencanaan				968.077	
		3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				221.077	
			- Kertas HVS 70 Gram	2	Ream	50.000	100.000	
			- Buku Folio	2	Daah	30.000	60.000	
			- Tip X	1	Daah	11.077	11.077	
		3	Cetak, Pengandaian dan Foto Copy				127.000	
			- Foto Copy	60	Lembar	400	24.000	
			- Jilid Buku	5	Daah	30.000	150.000	
		3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				640.000	
			- Nasi Kotak	30	Setak	30.000	900.000	
			- Snack	20	Setak	10.000	200.000	
			- Air Mineral	2	Ream	20.000	40.000	
3			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				700.241.406	PAD
3	1		Sub Bidang Pendidikan				8.000.000	
		3	Perencanaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/				8.000.000	
		3	Belanja Modal Jaringan/Instalasi				5.000.000	
			- Pengadaan KWH TK Waduk Jalawalla Asaan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	
3	2		Sub Bidang Kesehatan				40.374.550	DDM
3	2	1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll				24.984.550	
		3	Belanja Barang dan Jasa				23.484.550	
		3	Belanja Barang Perencanaan				2.261.500	
		3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				484.800	
			- Buku Folio Kiri	15	Daah	30.000	450.000	
			- Pulpen Stowman	1	Ream	30.000	30.000	
			- Insan Terbalik Balok	1	Daah	4.800	4.800	
		3	Cetak, Pengandaian dan Foto Copy				6.750	
			- Foto Copy	15	Lembar	450	6.750	
		3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				750.000	
			- Nasi Kotak	25	Setak	30.000	750.000	
			- Snack	25	Setak	30.000	250.000	

2 2 3	Belanja Jasa Honorarium				1.000.000	
2 2 3 4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.000.000	
	- Belanja Pemateri/Narasumber	2	Jasa	500.000	1.000.000	
2 2 1	Belanja Barang Perengkapan				21.243.000	
2 2 1 3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				483.000	
	- Buku Folio Kaki	15	Daah	30.000	450.000	
	- Pulpen Sistematis	1	Das	30.000	30.000	
	- Pengisi Kertas	2	Daah	3.000	3.000	
2 2 1 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				18.760.000	
	- Nasi Kotak	624	Sekab	20.000	12.480.000	
	- Snack	624	Sekab	10.000	6.240.000	
	- Air Mineral	2	Das	20.000	40.000	
2 2 2	Belanja Jasa Honorarium				2.000.000	
2 2 2 4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				2.000.000	
	- Belanja Pemateri/Narasumber	4	Jasa	500.000	2.000.000	
2 2 3	Belanja Perjalanan Dinas				1.800.000	
2 2 3 3	Belanja Keras Perlatan				1.800.000	
	- Pelatihan KPM	1	Paket	1.800.000	1.800.000	
2 2 4	Penyenggaraan Desa Stags Kesehatan				8.846.000	SDG
2 2 1	Belanja Barang dan Jasa				5.000.000	
2 2 1 1	Belanja Barang Perengkapan				1.870.000	
2 2 1 1 1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				430.000	
	- Kertas	4	Das	50.000	240.000	
	- Stempel	1	Daah	100.000	100.000	
	- Spindel	10	Daah	7.000	70.000	
	- Kertas Mula-Hari	20	Leubar	300	10.000	
2 2 1 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.000.000	
	- Nasi Kotak	33	Sekab	20.000	660.000	
	- Snack	33	Sekab	10.000	330.000	
	- Air Mineral	2	Das	5.000	10.000	
2 2 1 8	Belanja Benda Umbul-Umbul/Spanduk				180.000	
	- Balok Sekernat	1	Daah	30.000	30.000	
	- Balok Struktur	1	Daah	50.000	50.000	
	- Balok Tahapan PDDM	1	Daah	30.000	30.000	
2 2 1	Belanja Barang dan Jasa				4.120.000	
2 2 1 1	Belanja Barang Perengkapan				520.000	
2 2 1 1 1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				120.000	
	- Kertas HVS 70 Gram	1	Das	60.000	60.000	
	- Buku Folio	1	Daah	30.000	30.000	
	- Pulpen Sistematis	1	Das	30.000	30.000	
2 2 1 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				400.000	
	- Nasi Kotak	20	Sekab	20.000	400.000	
2 2 3	Perjalanan Dinas				3.600.000	
2 2 3 1	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten				3.600.000	
	- Transport	12	Kab	300.000	3.600.000	
2 2 9	Perencanaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Pasarsana Penyanda/Palindes				11.700.000	
2 2 9 2	Belanja Modal				11.700.000	
2 2 9 2 8	Belanja Modal / Perlatan Kesehatan				11.700.000	
	- Alat Ukur Panjang Bayi	3	Utas	2.300.000	7.500.000	
	- Tambangan Bayi Digital	3	Utas	1.400.000	4.200.000	
2 3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				646.278.240	SDG
2 3 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman				126.939.950	SDG
2 3 11 2	Belanja Modal Jalan/Pasarsana Jalann				126.939.950	
	- Bahat Beton Jalan Lingkungan Daman Dekapan	1	Paket	53.980.450	53.980.450	
	- Bahat Beton Jalan Lingkungan Tikok Kapi Seng Ta	1	Paket	72.959.500	72.959.500	
2 3 12	Perencanaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tua				111.602.400	SDG
2 3 12 8	Belanja Modal Jalan/Pasarsana Jalan				111.602.400	
	- Bahat Beton Ji. Tani Pattana	1	Paket	45.756.500	45.756.500	
	- Pengerasan Jalan Tani Kemeng Mata	1	Paket	33.716.450	33.716.450	
	- Bahat Beton Jalan Tani Percha	1	Paket	32.129.450	32.129.450	
2 3 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa				80.000.000	
2 3 13 6	Belanja Modal Jembatan				80.000.000	
	- Pembangunan Jembatan Sape	1	Paket	80.000.000	80.000.000	
2 3 14	Perencanaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pasarsana Jalan Desa (Goong, Belokan dll)				64.736.000	SDG
2 3 14 2	Belanja Modal Jalan/Pasarsana Jalann				64.736.000	
	- Derasow Jalan Lingkungan Dekapan	1	Paket	64.736.000	64.736.000	
2 3 16	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan				263.000.000	
2 3 16 4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				263.000.000	
	- Pembangunan gedung Serbaguna Lompon	1	Paket	263.000.000	263.000.000	
2 4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				8.888.300	SDG
2 4 14	Perencanaan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll				8.888.300	SDG
2 4 14 7	Belanja Barang dan Jasa Yang Dierahkan Kepada Masyarakat				8.888.300	
2 4 14 7 3	Belanja Bantuan Bangunan Untuk Dierahkan Kepada Masyarakat				8.888.300	
	- Pembangunan Jamban RTM Desa Kalyang	1	Utas	8.888.300	8.888.300	
2 4	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				26.045.000	ADD
2 4 4	Sub Bidang Kelambagaan Masyarakat				26.045.000	ADD
2 4 4 3	Pembinaan PKK				26.045.000	ADD
2 4 4 3 2	Belanja Barang dan Jasa				8.845.000	
2 4 4 3 2 1	Belanja Barang Perengkapan				1.545.000	

2	2	1	3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				420.000	
				- Kertas HVS 70 Gram	1	Rib	40.000	60.000	
				- Buku Peta Kiri	10	Beah	30.000	300.000	
				- Pulpen Stensman	2	Des	30.000	60.000	
2	2	1	6	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				238.000	
				- Foto Copy	800	Leatbar	450	225.000	
2	2	1	6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				900.000	
				- Nasi Kotak	30	Satak	20.000	600.000	
				- Snack	30	Satak	10.000	300.000	
2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				1.000.000	
2	2	2	4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Parasumber				1.000.000	
				- Belanja Penasteri/Parasumber	2	Jam	500.000	1.000.000	
2	2	3		Belanja Perjalanan Dinas				3.300.000	
2	2	3	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				3.300.000	
				- Pengurus PKL	10	Kodi	320.000	3.200.000	
2	2	7		Belanja Barang dan Jasa Yang Disediakan Kepada Masyarakat				20.200.000	
2	2	7	1	Belanja Bahan Perolehan Untuk Disediakan Kepada Masyarakat				12.900.000	
				- Pupuk Organik	200	Gds	40.000	8.000.000	
				- Pestisida Organik	150	Lain	10.000	1.500.000	
				- Pakhok	30	Bungkun	200.000	2.000.000	
				- Jaring	4	Isa	350.000	1.400.000	
2	2	7	6	Belanja Bantuan Hibit Tanaman/Hewan/Daun				7.300.000	
				- Sawi	60	Bungkun	15.000	900.000	
				- Kangkung	40	Bungkun	30.000	2.000.000	
				- Kacang Panjang	40	Bungkun	50.000	2.000.000	
				- Cabe Rawit	10	Bungkun	15.000	250.000	
				- Bayam	4	Bungkun	15.000	100.000	
				- Bawang Prey	30	kg	15.000	450.000	
				- Kacang	20	kg	30.000	600.000	
				- Jabe	30	kg	15.000	450.000	
				- Lengkas	20	kg	15.000	300.000	
				- Berch	30	kg	10.000	300.000	
4	4			DIKANG PERKEMBANGAN MASYARAKAT				5.000.000	Des-2019
				Sub Bidang Pelatihan dan penerbakan				2.900.000	
				Pelatihan Biotek/Pengenalan Teknologi Tepat Gasa Untuk Pertanian/Peternakan				2.900.000	
2	2			Belanja Barang dan Jasa				2.900.000	
2	2	1		Belanja Barang Perolehan				900.000	
2	2	1	6	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)				900.000	
				- Nasi Kotak	30	Satak	20.000	600.000	
				- Snack	30	Satak	10.000	300.000	
2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				2.000.000	
2	2	2	4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Parasumber				2.000.000	
				- Belanja Penasteri/Parasumber	4	Jam	500.000	2.000.000	
4	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				4.400.000	ADD
4	4	3	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				2.400.000	
4	4	3	2	Belanja Perjalanan Dinas				2.400.000	
4	4	3	3	Belanja Kursus Pelatihan				2.400.000	
				- Pelatihan Kepala Desa	1	Paket	2.400.000	2.400.000	
4	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				2.000.000	ADD
2	2			Belanja Barang dan Jasa				2.000.000	
2	2	1		Belanja Barang Perolehan				1.000.000	
2	2	1	6	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)				1.000.000	
				- Nasi Kotak	33	Satak	20.000	660.000	
				- Snack	33	Satak	10.000	330.000	
				- Air Mineral	2	Dt	5.000	10.000	
2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				1.000.000	
2	2	2	4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Parasumber				1.000.000	
				- Belanja Penasteri/Parasumber	2	Jam	500.000	1.000.000	
4				DIKANG PERANGKULANGAN DESKARA, MASYARAKAT DAN BERKEMBANG DESA				464.324.700	Des-2019- DT
				Sub Bidang Penanggulangan Bencana				118.130.900	
				Penanganan Penanggulangan Bencana				118.130.900	
2	2			Belanja Tidak Terduga				118.130.900	
2	2	1		Belanja Tidak Terduga				118.130.900	
				Penanggulangan Bencana Covid 19	1	Paket	118.130.900	118.130.900	
2	2			Sub Bidang Keadan Darurat				376.423.700	
2	2	1		Penanganan Keadan Darurat				376.423.700	
2	2	1		Belanja Tidak Terduga				376.423.700	
2	2	1		Belanja Tidak Terduga				376.423.700	
				- Belanja Bantuan Lapangan Turun (BLT)	1	Paket	376.423.700	376.423.700	
				JUMLAH BELANJA				1.706.424.138	
				SURPLUS/DEFISIT				6.847.228	
4				PEMHAYAAAN					
2	2			Penerimaan Pembiayaan				40.431.872	
2	2	1		SILPA Tahun Sebelumnya				40.431.872	
2	2	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya				40.431.872	
				- Danga Bank Tahun 2019	1	Tahun	9.518.172	9.518.172	

	- Alokasi Dana Desa	1	Tahun	3.445.500	3.445.500	
	- Dana Desa	1	Tahun	27.467.500	27.467.500	
4.3	Pengeluaran Pembiayaan				90.298.000	2020
4.3.1	- Penyertaan Modal BUMDes				50.298.000	
4.3.1.1	- Penyertaan Modal BUMDes				50.298.000	
	- Penyertaan Modal BUMDes	1	Tahun	50.298.000	50.298.000	
	JUNJAH PEMBAYAAN				6.847.528	
	JUNJAH				0	

Kadingsh, 26 Oktober 2020
KEPALA DESA KADIRGEEH

UMAR, S.Pd.I



Dokumentasi





PAREPARE

Biodata Penulis



Alfina lahir di dusun Tiktok, Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 agustus 2000. Penulis lahir dari pasangan Alo dan Hajrah dan merupakan anak sulung dari empat bersaudara.

Pada tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar Kecil (SDK) Tiktok dan lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Parepare dan lulus tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah jenjang menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Parepare dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui jalur ujian mandiri.

Dengan segala doa, dukungan, serta motivasi tinggi, akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh (Analisis Akuntansi Syariah)”. Penulis sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih mendalam kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan.